



**PENGADILAN NEGERI TANGERANG  
KELAS I A KHUSUS**



**BerAKHLAK**

# bangga  
melayan  
bangsa

**N  
KORUPSI**

# **LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025**



**PENGADILAN NEGERI TANGERANG**

Jl. TMP Taruna No.7 Tangerang  
Profesional - Responsif - Integritas - Mandiri - Akuntabel

<https://pn-tangerang.go.id>

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas karunia dan limpahan rahmatnya sehingga kami dapat menyusun rangkaian kegiatan di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus dalam waktu 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus. Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada Pengadilan Tinggi Banten dan Mahkamah Agung Republik Indonesia sekaligus penyajian informasi kepada masyarakat atas pelaksanaan tugas pokok fungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama. Laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 ini disusun sesuai dengan instruksi yang tertuang dalam Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia No 16516/SEK/OT1.6/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025.

Dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2025 tersebut disajikan informasi mengenai pelaksanaan tugas di bagian Kepaniteraan meliputi Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata dan Kepaniteraan Hukum, serta di bagian Kesekretariatan meliputi Sub Bagian Tata Usaha Keuangan, Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, serta Sub bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2025 disampaikan sebagai rangkaian tugas pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus, semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2025 ini dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, akuntabel serta memberikan manfaat demi mewujudkan peradilan yang adil dan transparan.

Tangerang, 12 Januari 2026  
Ketua,  
  
  
Muhammad Alfi Sahrin Usup

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| Kata Pengantar .....   | i   |
| Daftar Isi .....   | ii  |
| Daftar Gambar, Tabel Dan Lampiran .....  | iii |
| Bab I Pendahuluan .....  | 1   |
| BAB II Keadaan Perkara Di Pengadilan Negeri Tangerang.....                       | 3   |
| A. Keadaan Perkara .....   | 3   |
| B. Penyelesaian Perkara.....   | 4   |
| C. Program Prioritas Nasional.....   | 6   |
| BAB III Sumber Daya Manusia .....  | 10  |
| (Komposisi Sdm Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan) .....                | 10  |
| A. Mutasi .....  | 19  |
| B. Promosi .....   | 22  |
| C. Pensiun.....  | 22  |
| D. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis).....   | 23  |
| BAB IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi ..... | 30  |
| A. Pengelolaan Keuangan .....  | 30  |
| B. Pengelolaan Saranan Dan Prasarana .....                                       | 34  |
| C. Pengelolaan Teknologi Informasi .....   | 41  |
| BAB V Peningkatan Pelayanan Publik .....   | 47  |
| A. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan .....                             | 47  |
| B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) .....                                     | 49  |
| C. Inovasi Pelayanan Publik .....  | 52  |
| BAB VI Pengawasan .....  | 55  |
| A. Internal .....  | 55  |
| B. External .....  | 56  |
| BAB VII Penutup .....  | 57  |
| A. Kesimpulan .....  | 57  |
| B. Rekomendasi .....   | 58  |

## DAFTAR TABEL DAN DIAGRAM

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1 Jumlah Perkara Pidana -----   | 3  |
| Tabel 2 Jumlah Perkara Perdata -----  | 3  |
| Tabel 3 Jumlah Perkara yang Diselesaikan Secara Tepat Waktu -----   | 4  |
| Tabel 4 Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum -----  | 4  |
| Tabel 5 Jumlah perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif---                     | 4  |
| Tabel 6 Jumlah Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi -----   | 5  |
| Tabel 7 Jumlah Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi-----  | 5  |
| Tabel 8 Jumlah Perkara Perdata yang Menggunakan <i>e-Court</i> -----  | 5  |
| Tabel 9 Jumlah perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)-----                                  | 5  |
| Tabel 10 Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)-----                         | 5  |
| Tabel 11 Layanan Posbakum-----  | 7  |
| Tabel 12 Realisasi Jumlah Perkara Prodeo Tahun 2025-----  | 8  |
| Tabel 13 Rincian Jenis Perkara Perkara Prodeo -----   | 8  |
| Tabel 14 Profil Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus -----                          | 11 |
| Tabel 15 Profil Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pengadilan Negeri Tangerang<br>Kelas 1A Khusus ----- | 18 |
| Tabel 16 Mutasi Masuk Alih Tugas pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus -----                         | 19 |
| Tabel 17 Mutasi Keluar Alih Tugas pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus -----                        | 21 |
| Tabel 18 Promosi pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus -----   | 22 |
| Tabel 19 Daftar Pegawai Pensiun pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus -----                          | 22 |
| Tabel 20 Daftar Pegawai Yang Mengikuti Diklat (SDM Teknis)-----   | 23 |
| Tabel 21 Daftar Pegawai Yang Mengikuti Diklat (SDM Non Teknis)-----   | 26 |
| Tabel 22 Rekapitulasi Belanja Pegawai -----   | 30 |
| Tabel 23 Rincian Realisasi Belanja Pegawai -----  | 30 |
| Tabel 24 Rekapitulasi Belanja Barang DIPA 01-----   | 31 |
| Tabel 25 Rincian Realisasi Belanja Barang DIPA 01-----  | 31 |
| Tabel 26 Data Barang Hibah dari Bank Mitra -----  | 32 |
| Tabel 27 Rekapitulasi Belanja Barang DIPA 03-----   | 33 |
| Tabel 28 Rincian Realisasi Belanja Barang DIPA 03-----  | 32 |
| Tabel 29 Rekapitulasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) -----  | 34 |
| Tabel 30 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin -----   | 35 |
| Tabel 31 Kendaraan Dinas -----  | 36 |
| Tabel 32 Rumah Dinas -----  | 37 |

|  |    |
|--|----|
| Tabel 33 Matriks Sarana dan Prasarana -----  | 37 |
| Tabel 34 Matriks Sarana dan Prasarana Fasilitas Perkantoran -----                      | 38 |
| Tabel 35 Perangkat Keras -----   | 41 |
| Tabel 36 Perangkat Lunak-----  | 41 |
| Tabel 37 Akun <i>E-Court</i> -----   | 43 |
| Tabel 38 Perkara Perdata Melalui <i>E-Court</i> -----                                  | 43 |
| Tabel 39 Data Penggunaan <i>E-Berpadu</i> -----  | 45 |
| Tabel 40 Jumlah Pengguna Aplikasi Internal Pengadilan Negeri Tangerang Kelas-----      | 46 |
|  |    |
| Diagram 1 Komposisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kepangkatan (Golongan/Ruang)----- | 10 |
| Diagram 2 Komposisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Berdasarkan Golongan--  | 10 |
| Diagram 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan -----                               | 11 |
| Diagram 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan -----                                  | 11 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 50 menyatakan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta dan selain bertugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten di mana daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus merumuskan kebijakan-kebijakan peradilan. Dalam merumuskan kebijakan-kebijakan peradilan, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus mengacu pada kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung RI sebagai lembaga peradilan tertinggi yang menaunginya serta Pengadilan Tinggi Banten.

Selain itu, diterbitkan juga cetak biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035. Cetak biru pembaruan pengadilan 2010-2035 ini memuat perencanaan strategis untuk 25 (dua puluh lima) tahun mendatang yang dimaksudkan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh. Dalam cetak biru ini dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung secara ideal, antara lain:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan;
2. Melaksanakan pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN;
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur;
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional;
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan;

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional;
7. Melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan;
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi;
10. Modernisasi Peradilan dengan berbasis TI (Teknologi Informasi) terpadu.

Misi Mahkamah Agung dirumuskan dalam upaya mencapai visinya “Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung”. Seperti diuraikan sebelumnya, fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutus suatu sengketa/menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi. Misi Mahkamah Agung Tahun 2010-2035 adalah:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Berdasarkan Visi dan Misi Mahkamah Agung RI di atas, maka Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Tangerang Yang Agung

- Misi :
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tangerang;
  2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
  3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tangerang;
  4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Tangerang.

## BAB II

### KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS IA KHUSUS

#### A. KEADAAN PERKARA

Keadaan perkara di tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut:

##### 1. Keadaan Perkara Kepaniteraan Pidana

Tabel 1

Jumlah Perkara Pidana

| Jenis Perkara | Sisa perkara tahun 2024 | Perkara masuk | Perkara yang diputus | Sisa perkara tahun 2025 | Persentase penyelesaian perkara tahun 2025 |
|---------------|-------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|--|
| Biasa         | 525                     | 2.188         | 2.373                | 340                     | 87.46%                                     |
| Cepat         | 0                       | 187           | 187                  | 0                       | 100%                                       |
| Anak          | 6                       | 74            | 76                   | 4                       | 95%  |
| Pra Peradilan | 1                       | 23            | 23                   | 1                       | 95.83%                                     |
| Total         | 532                     | 2.472         | 2.659                | 345                     | 88.51%                                     |

##### 2. Keadaan Perkara Kepaniteraan Perdata

Tabel 2

Jumlah Perkara Perdata

| Jenis Perkara           | Sisa perkara tahun 2024 | Perkara masuk | Perkara yang diputus | Sisa perkara tahun 2025 | Persentase penyelesaian perkara tahun 2025 |
|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|--|
| Gugatan                 | 691                     | 1.544         | 1.653                | 582                     | 73.63%                                     |
| Permohonan              | 91                      | 1.690         | 1.766                | 15                      | 99.15%                                     |
| Gugatan Sederhana       | 45                      | 124           | 140                  | 29                      | 82.84%                                     |
| Perlawanan/<br>Bantahan | 18                      | 25            | 25                   | 18                      | 58.19%                                     |
| Total                   | 845                     | 3.383         | 3.584                | 644                     | 84.76%                                     |

## B. PENYELESAIAN PERKARA

### 1. Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

Tabel 3

Jumlah Perkara yang Diselesaikan Secara Tepat Waktu

| Perkara |                         | Jumlah perkara putus tahun 2025 | Jumlah perkara diputus tepat waktu | Jumlah perkara diputus tidak tepat waktu | Persentase penyelesaian perkara diputus tepat waktu |
|---------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|---|
| Pidana  | Biasa                   | 2.373                           | 2.373                              | 0  | 100%  |
|         | Cepat                   | 187                             | 187                                | 0  | 100%  |
|         | Anak                    | 76                              | 76                                 | 0  | 100%  |
|         | Pra Peradilan           | 23                              | 23                                 | 0  | 100%  |
| Perdata | Gugatan                 | 1.653                           | 1.552                              | 101                                      | 93.88%  |
|         | Permohonan              | 1.766                           | 1.763                              | 3  | 99.83%  |
|         | Gugatan Sederhana       | 140                             | 116                                | 24                                       | 82.85%  |
|         | Perlawanan/<br>Bantahan | 25                              | 24                                 | 1  | 96.00%  |

### 2. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali

Tabel 4

Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

| Perkara | Perkara putus tahun 2025 | Perkara putus tahun 2025 tidak mengajukan Banding |            | Perkara putus tahun 2025 tidak mengajukan Kasasi |            | Perkara putus tahun 2025 tidak mengajukan PK |            |
|---------|--------------------------|---|------------|--|------------|--|------------|
|         |                          | Jumlah  | Persentase | Jumlah   | Persentase | Jumlah                                       | Persentase |
| Pidana  | 2.659                    | 2.540   | 95.52%     | 2.579  | 96.99%     | 2.644  | 99.43%     |
| Perdata | 3.584                    | 3.321   | 92.66%     | 3.418  | 95.37%     | 3.526  | 98.38%     |

### 3. Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif

Tabel 5

Jumlah perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif

| Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif | Berhasil | Tidak Berhasil |
|--|----------|----------------|
| 7  | 7        | 0              |

4. Perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Tabel 6

Jumlah Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi

| Jumlah Perkara Mediasi | Berhasil | Tidak Berhasil | Tidak dapat dilaksanakan | Dalam Proses |
|------------------------|----------|----------------|--------------------------|--------------|
| 2.034                  | 75       | 668            | 11                       | 1.280        |

5. Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi

Tabel 7

Jumlah Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi

| Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi | Berhasil | Tidak Berhasil |
|---|----------|----------------|
| 26  | 20       | 6              |

6. Perkara Perdata yang Menggunakan *e-Court*

Tabel 8

Jumlah Perkara Perdata yang Menggunakan *e-Court*

| Jumlah perkara perdata | Jumlah perkara perdata yang diajukan menggunakan <i>e-Court</i> | Jumlah perkara perdata yang diajukan secara konvensional |
|------------------------|---|--|
| 3.383                  | 3.383   | 0  |

7. Perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

Tabel 9

Jumlah perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

| Jumlah perkara pidana | Jumlah perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) | Jumlah perkara pidana yang diajukan secara konvensional |
|-----------------------|---|---|
| 2.472                 | 2.472   | 0   |

8. Layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

Tabel 10

Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

| Jumlah layanan perkara pidana | Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) | Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara konvensional |
|-------------------------------|---|---|
| 13.060                        | 13.060  | 0   |

## **C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL**

### **1. Pos Bantuan Hukum**

Kebijakan Negara akan arah pembangunan semakin menegaskan pentingnya akses ke pengadilan bagi masyarakat miskin dan termarginalkan. Negara juga semakin mengukuhkan pentingnya bantuan hukum sebagai strategi pencapaian akses terhadap pengadilan tersebut, masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mendapatkan keadilan, hal ini kemudian direspons oleh Mahkamah Agung RI dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat kurang mampu.

Masyarakat miskin biasanya identik dengan tingkat pendidikan rendah yang berimplikasi pada minimnya pengetahuan mereka terhadap masalah hukum ketika harus membawa perkaranya ke pengadilan. Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam menyajikan perkaranya ke pengadilan, sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum prosedural, baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum.

Pos bantuan hukum (Posbakum) merupakan usaha Mahkamah Agung RI untuk menyentuh kalangan terbawah yakni masyarakat awam hukum dan mereka yang tidak mampu membayar untuk mendapatkan bantuan atau proses hukum agar tetap dapat beracara di pengadilan. Di dalam Pos Bantuan Hukum ini akan disediakan pengacara piket yang bertugas untuk memberikan layanan hukum berupa konsultasi atau advis hukum kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa biaya.

Menurut peraturan MA-RI (Perma) No.1 Tahun 2014 bahwa pengadilan menyediakan Pos Bantuan Hukum yang melayani pemberian informasi, konsultasi dan nasihat hukum atau membantu pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus adalah layanan yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman dan peradilan umum. Petugas pemberi hukum adalah pemberi layanan di Pos Bantuan Hukum yang merupakan advokat, sarjana hukum dan sarjana syariah yang berasal dari lembaga pemberi layanan Pos Bantuan Hukum yang bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam. Selanjutnya layanan Pos Bantuan

Hukum Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus dituangkan dalam perjanjian kerjasama

Sebagai pelaksanaan akan implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, serta SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 52/DJU/SK/HK.006/S Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 maka pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus menjalin kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yayasan Keadilan dan Kesetaraan Hukum, berkedudukan di Tangerang, berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:45/SEK1.W29.U4/PL1.1.5/I/2025 tanggal 7 Januari 2025 dan Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yayasan Keadilan dan Kesetaraan Hukum tanggal 7 Januari 2025.

Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus telah memberikan pelayanan bantuan hukum sebanyak 801 (delapan ratus satu) layanan kepada para pencari keadilan, dengan nilai kontrak sebesar Rp62.361.600,00 (enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah), adapun capaian realisasi anggaran Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus tahun 2025 mencapai 92,16%. Realisasi anggaran tidak 100% dari Pagu Anggaran Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) dikarenakan adanya proses negosiasi saat penawaran calon penyedia jasa Posbakum.

Output layanan ditargetkan sebesar 840 (delapan ratus empat puluh) layanan Posbakum, namun realisasinya 801 (delapan ratus satu) pencari keadilan yang diberikan layanan Posbakum. Sehingga dapat dikatakan layanan yang telah diberikan Posbakum pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus belum mencapai target yang diharapkan. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan terkait pencari keadilan yang akan dilayani wajib memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Tabel 11  
Layanan Posbakum

| NO. | SATKER                      | ANGGARAN POSBAKUM |                 |                | Jumlah Pencari Keadilan yang dilayani |
|-----|-----------------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------|
|     |                             | Pagu (Rp)         | Realisasi (Rp)  | Persentase (%) |                                       |
| 1.  | Pengadilan Negeri Tangerang | Rp62.361.600,00   | Rp58.983.680,00 | 92,16%         | 801                                   |

## 2. SIDANG KELILING (DI LUAR GEDUNG)/PELAYANAN TERPADU

Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus pada tahun 2025 tidak menyelenggarakan Sidang Keliling/Sidang Di Luar Gedung dikarenakan akses masyarakat ke Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus masih mudah terjangkau. Sehingga Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus tidak menyediakan anggaran untuk Sidang Keliling dan Pengadilan Negeri Tangerang belum tersedia anggaran untuk kegiatan tersebut.

## 3. PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)

Sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2014, fasilitas pembebasan biaya perkara adalah sebuah layanan dimana Negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan.

Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus mendapatkan anggaran sebesar Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan output 19 (sembilan belas) perkara prodeo. Realisasi anggaran sebesar Rp4.020.000,00 (empat juta dua puluh ribu rupiah) dengan persentase 93,05%, dengan sisa anggaran sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Pada bulan November 2025 terjadi perubahan output dari 19 (sembilan belas) menjadi 21 (dua puluh satu) perkara prodeo. Hal ini dilakukan dalam rangka melakukan optimalisasi anggaran. Berikut adalah data perkara prodeo yang selesaikan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus sebagai berikut:

Tabel 12

Realisasi Jumlah Perkara Prodeo Tahun 2025

| Jumlah perkara yang diberikan pembebasan biaya | Jumlah perkara yang diterima | Putus | Sisa prodeo belum putus |
|--|------------------------------|-------|-------------------------|
| 21   | 21                           | 19    | 2                       |

Tabel 13

Rincian Jenis Perkara Perkara Prodeo

| NO | Bulan    | Jumlah Perkara | Jenis Perkara  |
|----|----------|----------------|--|
| 1  | Januari  | 2              | Perbaikan nama   |
| 2  | Februari | 2              | Akta kematian dan akta kelahiran                             |
| 3  | Maret    | 6              | Akta kematian, perbaikan nama dan perceraian                 |
| 4  | April    | 1              | Perceraian   |
| 5  | Mei      | 5              | Akta kematian, perbaikan nama, akta kelahiran dan perceraian |
| 6  | Juni     | 0              | -  |

|    |           |   |  |
|----|-----------|---|--|
| 7  | Juli      | 0 | -  |
| 8  | Agustus   | 0 | -  |
| 9  | September | 0 | -  |
| 10 | Oktober   | 0 | -  |
| 11 | November  | 5 | Pengesahan anak, akta kelahiran,<br>perceraian |
| 12 | Desember  | 0 | -  |

### BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus adalah salah satu Lembaga Kekuasaan Kehakiman yang menangani perkara-perkara yang berasal dari wilayah hukumnya yaitu: Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

Begitu luasnya wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus sehingga untuk menangani perkara dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan cepat, efisien dan biaya ringan membutuhkan personil atau sumber daya manusia yang mempunyai kuantitas memadai serta kualitas yang baik. Total sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) orang, yang terdiri dari 147 (seratus empat puluh tujuh) orang Pegawai Negeri Sipil dan 26 (dua puluh enam) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Berikut adalah komposisi pegawai dimaksud:

Diagram 1

Komposisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kepangkatan (Golongan/Ruang)

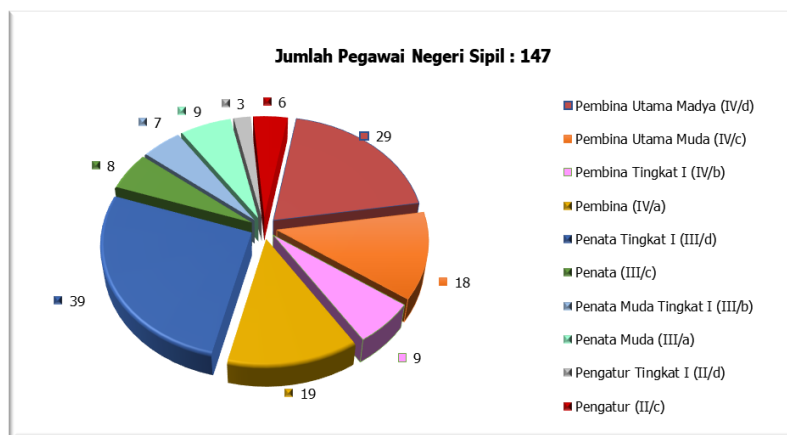


Diagram 2

Komposisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Berdasarkan Golongan



Diagram 3

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

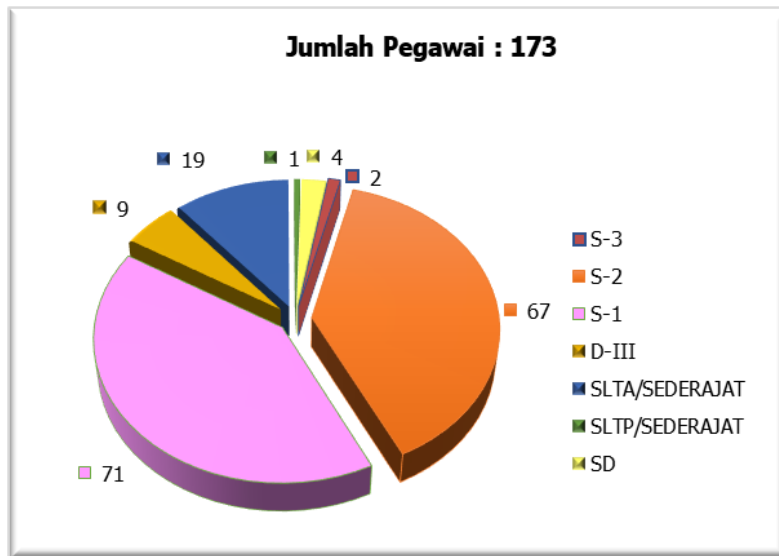
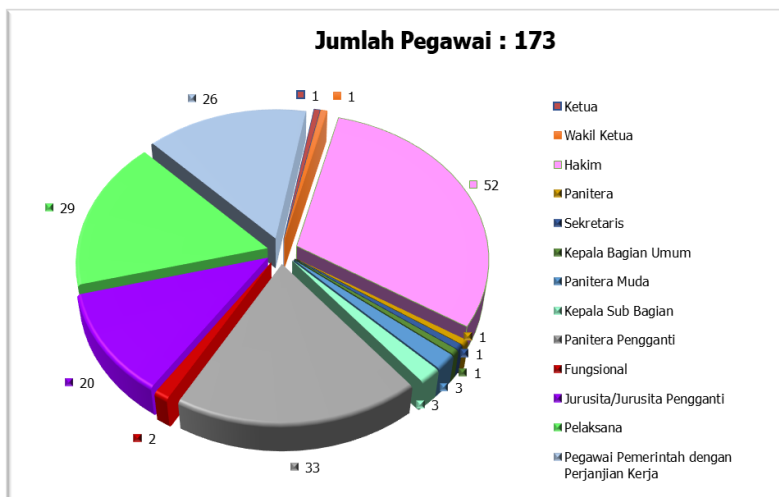


Diagram 4

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



Selain komposisi pegawai berdasarkan kepegangatan, pendidikan, dan jabatan, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus juga akan menyampaikan profil pegawai dengan tanggal 22 Desember 2025, yaitu:

Tabel 14

Profil Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus

| No | Nama                                     | Jabatan     | Golongan/Pangkat         |
|----|--|-------------|--------------------------|
| 1. | H. Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H. | Ketua       | Pembina Utama Madya IV/d |
| 2. | Budiansyah, S.H., M.H.                   | Wakil Ketua | Pembina Utama Madya IV/d |

|     |  |            |                          |
|-----|--|------------|--------------------------|
| 3.  | Rotua Roosa Mathilda Tampubolon, S.H., M.H.                | Panitera   | Pembina Utama Muda IV/c  |
| 4.  | H. Zulfikar Arif Rahman Purba, S.H., M.M.                  | Sekretaris | Pembina Utama Muda IV/c  |
| 5.  | Mangapul Girsang, S.H.                                     | Hakim      | Pembina Utama Madya IV/d |
| 6.  | Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum.                           | Hakim      | Pembina Utama Madya IV/d |
| 7.  | Saidin Bagariang, S.H.                                     | Hakim      | Pembina Utama Madya IV/d |
| 8.  | Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H, M.H.                 | Hakim      | Pembina Utama Madya IV/d |
| 9.  | Tongam Oase Christian Hasudungan Simanjuntak, S.H., M.Hum. | Hakim      | Pembina Utama Madya IV/d |
| 10. | Beslin Sihombing, S.H., M.H.                               | Hakim      | Pembina Utama Madya IV/d |
| 11. | Eddy Cahyono, S.H., M.H.                                   | Hakim      | Pembina Utama Madya IV/d |
| 12. | Taryan Setiawan, S.H., M.H.                                | Hakim      | Pembina Utama Madya IV/d |
| 13. | Agung Suhendro, S.H., M.H.                                 | Hakim      | Pembina Utama Madya IV/d |
| 14. | Lucky Rombot Kalalo, S.H.                                  | Hakim      | Pembina Utama Madya IV/d |
| 15. | Kamijon, S.H.  | Hakim      | Pembina Utama Madya IV/d |
| 16. | Franklin B Tamara, S.H., M.H.                              | Hakim      | Pembina Utama Madya IV/d |
| 17. | Edy Toto Purba, S.H., M.H.                                 | Hakim      | Pembina Utama Madya IV/d |
| 18. | Fathul Mujib, S.H., M.H.                                   | Hakim      | Pembina Utama Madya IV/d |
| 19. | Wadji Pramono, S.H., M.H.                                  | Hakim      | Pembina Utama Madya IV/d |
| 20. | Santosa, S.H., M.H.  | Hakim      | Pembina Utama Madya IV/d |
| 21. | Edi Junaedi, S.H., M.H.                                    | Hakim      | Pembina Utama Madya IV/d |
| 22. | Erry Iriawan, S.H.   | Hakim      | Pembina Utama Madya IV/d |
| 23. | Sapto Supriyono, S.H., M.H.                                | Hakim      | Pembina Utama Madya IV/d |
| 24. | Flowerry Yulidas, S.H., M.H.                               | Hakim      | Pembina Utama Madya IV/d |
| 25. | Basuki Wiyono, S.H., M.H.                                  | Hakim      | Pembina Utama Madya IV/d |

|     |   |       |                          |
|-----|---|-------|--------------------------|
| 26. | Harun Yulianto, S.H., M.H.                      | Hakim | Pembina Utama Madya IV/d |
| 27. | Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum.                      | Hakim | Pembina Utama Madya IV/d |
| 28. | Martua Sagala, S.H., M.H.                       | Hakim | Pembina Utama Madya IV/d |
| 29. | Toni Irfan, S.H.                                | Hakim | Pembina Utama Madya IV/d |
| 30. | Ismail Hidayat, S.H., M.H.                      | Hakim | Pembina Utama Madya IV/d |
| 31. | Ir Abdul Rahman Karim, S.H.                     | Hakim | Pembina Utama Madya IV/d |
| 32. | Said Husein, S.H., M.H.                         | Hakim | Pembina Utama Muda IV/c  |
| 33. | Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H.                | Hakim | Pembina Utama Muda IV/c  |
| 34. | Masduki, S.H.                                   | Hakim | Pembina Utama Muda IV/c  |
| 35. | Novita Riama, S.H., M.H.                        | Hakim | Pembina Utama Muda IV/c  |
| 36. | Iwan Wardhana, SH., MH                          | Hakim | Pembina Utama Muda IV/c  |
| 37. | Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum.                    | Hakim | Pembina Utama Muda IV/c  |
| 38. | Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.          | Hakim | Pembina Utama Muda IV/c  |
| 39. | Yandri Roni, S.H., M.H.                         | Hakim | Pembina Utama Muda IV/c  |
| 40. | Kony Hartanto, S.H., M.H.                       | Hakim | Pembina Utama Muda IV/c  |
| 41. | Jamser Simanjuntak, S.H, M.H.                   | Hakim | Pembina Utama Muda IV/c  |
| 42. | Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H.                | Hakim | Pembina Utama Muda IV/c  |
| 43. | Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.                 | Hakim | Pembina Utama Muda IV/c  |
| 44. | Dony Dortmund, S.H., M.H.                       | Hakim | Pembina Utama Muda IV/c  |
| 45. | Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H.                 | Hakim | Pembina Utama Muda IV/c  |
| 46. | Anak Agung Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H. | Hakim | Pembina Utama Muda IV/c  |
| 47. | Jan Oktavianus, S.H., M.H.                      | Hakim | Pembina Utama Muda IV/c  |
| 48. | Dini Damayanti, S.H.                            | Hakim | Pembina Tingkat I IV/b   |

|     |                                  |   |                           |
|-----|----------------------------------|---|---------------------------|
| 49. | Hendra Yuristiawan, S.H., M.H.   | Hakim   | Pembina Tingkat I<br>IV/b |
| 50. | Iriaty Khairul Ummah, S.H.       | Hakim   | Pembina Tingkat I<br>IV/b |
| 51. | Dedy Heriyanto, S.H.             | Hakim   | Pembina Tingkat I<br>IV/b |
| 52. | Forci Nilpa Darma, S.H., M.H.    | Hakim   | Pembina Tingkat I<br>IV/b |
| 53. | Guntur Nurjadi, S.H.             | Hakim   | Pembina Tingkat I<br>IV/b |
| 54. | Derit Werdiningsih, S.H.         | Hakim   | Pembina Tingkat I<br>IV/b |
| 55. | Ahmad Husaini, S.H.M.H.          | Hakim   | Pembina Tingkat I<br>IV/b |
| 56. | Raden Mar Suprpto, S.H.          | Hakim   | Pembina Tingkat I<br>IV/b |
| 57. | Dessy Herliani, S.Sos.           | Kepala Bagian<br>Umum   | Pembina<br>IV/a           |
| 58. | Hendra Azwar, S.H., M.H.         | Panitera Muda<br>Pidana   | Pembina<br>IV/a           |
| 59. | Husna Machmud, S.H., M.H.        | Panitera Muda<br>Perdata  | Pembina<br>IV/a           |
| 60. | Dedi Irawan, S.H.                | Panitera Muda<br>Hukum  | Penata Tingkat I<br>III/d |
| 61. | Diniarti Mayaciptani, S.E., M.M. | Kepala Subbagian<br>Subbagian<br>Perencanaan,<br>Teknologi<br>Informasi, dan<br>Pelaporan | Pembina<br>IV/a           |
| 62. | Rachmat Budiyanto                | Kepala Subbagian<br>Subbagian<br>Kepegawaian,<br>Organisasi, dan<br>Tata Laksana          | Penata Tingkat I<br>III/d |
| 63. | Henny Fitria, S.E.               | Kepala Subbagian<br>Subbagian Tata<br>Usaha dan<br>Keuangan                               | Penata Tingkat I<br>III/d |
| 64. | Irwan Bayumi, S.H., M.H.         | Panitera<br>Pengganti   | Pembina<br>IV/a           |
| 65. | Yetti, S.H., M.H.                | Panitera<br>Pengganti   | Pembina<br>IV/a           |
| 66. | Wiji Astuti, S.H., M.H.          | Panitera<br>Pengganti   | Pembina<br>IV/a           |
| 67. | Ikat, S.H., M.H.                 | Panitera<br>Pengganti   | Pembina<br>IV/a           |

|     |                                   |                    |                        |
|-----|-----------------------------------|--------------------|------------------------|
| 68. | Ety Meirohyati, S.H., M.H.        | Panitera Pengganti | Pembina IV/a           |
| 69. | Tri Budiana Sugianti, S.H., M.H.  | Panitera Pengganti | Pembina IV/a           |
| 70. | Nunyati, S.H., M.H.               | Panitera Pengganti | Pembina IV/a           |
| 71. | Wasiatul Chairy, S.H., M.H.       | Panitera Pengganti | Pembina IV/a           |
| 72. | Eva Ruzana, S.H., M.H.            | Panitera Pengganti | Pembina IV/a           |
| 73. | Zelfi Rahmadiani, S.H.            | Panitera Pengganti | Penata Tingkat I III/d |
| 74. | Dini Yuli Rosmawati, S.H.         | Panitera Pengganti | Penata Tingkat I III/d |
| 75. | Baik Mustikawati, S.H.            | Panitera Pengganti | Penata Tingkat I III/d |
| 76. | Anita Rahmawati, S.H.             | Panitera Pengganti | Penata Tingkat I III/d |
| 77. | Ade Komarudin, S.H.               | Panitera Pengganti | Penata Tingkat I III/d |
| 78. | Fuji Nurheni, S.H.                | Panitera Pengganti | Penata Tingkat I III/d |
| 79. | Yuris Dhetiawan, S.H., M.H.       | Panitera Pengganti | Penata Tingkat I III/d |
| 80. | Nova Vitrianida, S.H.             | Panitera Pengganti | Penata Tingkat I III/d |
| 81. | Pujiatno, S.H.                    | Panitera Pengganti | Penata Tingkat I III/d |
| 82. | Susmiyati, S.H.                   | Panitera Pengganti | Penata Tingkat I III/d |
| 83. | Hilman Syahadat, S.T., S.H.       | Panitera Pengganti | Penata Tingkat I III/d |
| 84. | Andre, S.H.                       | Panitera Pengganti | Penata Tingkat I III/d |
| 85. | Rizqi Isma Apriyani, S.H., M.H.   | Panitera Pengganti | Penata Tingkat I III/d |
| 86. | Jefry Novirza, S.H.               | Panitera Pengganti | Penata Tingkat I III/d |
| 87. | Fitri Ichtianto, S.H., M.H.       | Panitera Pengganti | Penata Tingkat I III/d |
| 88. | Sri Hartini, S.E., M.H.           | Panitera Pengganti | Penata Tingkat I III/d |
| 89. | Yuliana, S.H., M.H.               | Panitera Pengganti | Penata Tingkat I III/d |
| 90. | Dr. Astrid Hastridian, S.H., M.H. | Panitera Pengganti | Penata Tingkat I III/d |

|      |   |                                       |                        |
|------|---|---------------------------------------|------------------------|
| 91.  | Candra Dewi, S.H.                         | Panitera Pengganti                    | Penata Tingkat I III/d |
| 92.  | Lia Marlia, S.H., M.H.                    | Panitera Pengganti                    | Penata Tingkat I III/d |
| 93.  | Retno Dwi Hapsari, S.H.                   | Panitera Pengganti                    | Penata Tingkat I III/d |
| 94.  | Rully Dwiyanti Yunitasari, S.H.           | Panitera Pengganti                    | Penata Tingkat I III/d |
| 95.  | Akhmad Zumroni, S.H.                      | Panitera Pengganti                    | Penata III/c           |
| 96.  | Dhesga Selano Margen, S.H.                | Panitera Pengganti                    | Penata III/c           |
| 97.  | Welly Kriwara, S.H., M.H.                 | Juru Sita                             | Pembina IV/a           |
| 98.  | Eli Susilawati, S.H., M.H.                | Juru Sita                             | Pembina IV/a           |
| 99.  | Winny Yoanda Walujo, S.E., M.H.           | Juru Sita                             | Pembina IV/a           |
| 100. | Mouna Claudia Camelia Kaligis, S.H., M.H. | Juru Sita                             | Pembina IV/a           |
| 101. | Alicia Tri Wardhani, S.H.                 | Juru Sita                             | Penata Tingkat I III/d |
| 102. | Miskah, S.H., M.H.                        | Juru Sita                             | Penata Tingkat I III/d |
| 103. | Ambo Adi Manggaukang, S.H.                | Juru Sita                             | Penata Tingkat I III/d |
| 104. | Dedy Purwanto, S.H., M.H.                 | Juru Sita                             | Penata III/c           |
| 105. | Peni Juniska Situngkir, S.H., M.H.        | Klerek - Analisis Perkara Peradilan   | Pembina IV/a           |
| 106. | Martin Octavianus, S.H., M.H.             | Klerek - Analisis Perkara Peradilan   | Pembina IV/a           |
| 107. | Euis Hastuti Alawiah, S.Sos.              | Juru Sita Pengganti                   | Penata Tingkat I III/d |
| 108. | Ike Rustiati, S.H.                        | Operator - Penata Layanan Operasional | Penata Tingkat I III/d |
| 109. | Muhamad Toufan Putra Pratama, S.E.        | Pranata Keuangan APBN Penyelia        | Penata Tingkat I III/d |
| 110. | Yusuf Susanto, S.E., S.H.                 | Klerek - Analisis Perkara Peradilan   | Penata Tingkat I III/d |
| 111. | Chuzamiah, S.H.                           | Juru Sita Pengganti                   | Penata Tingkat I III/d |
| 112. | Resti Desanjaya, SKM                      | Klerek - Analisis Perkara Peradilan   | Penata Tingkat I III/d |
| 113. | Ashar Abdi, S.H.                          | Klerek - Analisis Perkara Peradilan   | Penata Tingkat I III/d |

|      |                                 |                                       |                             |
|------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 114. | Rudi Dwi Kurniawan, S.T.        | Operator - Penata Layanan Operasional | Penata Tingkat I III/d      |
| 115. | Nirmalia Anggraini, S.H.        | Pranata Keuangan APBN Penyelia        | Penata Tingkat I III/d      |
| 116. | Dewi Martiani Wulansari, S.H.   | Operator - Penata Layanan Operasional | Penata Tingkat I III/d      |
| 117. | Nurwita, S.H.                   | Klerek - Analisis Perkara Peradilan   | Penata Tingkat I III/d      |
| 118. | Sudargo Hartono, A.Md.          | Juru Sita Pengganti                   | Penata III/c                |
| 119. | Diana Wahyuningsih, S.H.        | Juru Sita Pengganti                   | Penata III/c                |
| 120. | Frezi Widianingsih, S.H.        | Operator - Penata Layanan Operasional | Penata III/c                |
| 121. | Priska Rufina Sianturi, S.E.    | Juru Sita Pengganti                   | Penata III/c                |
| 122. | Ayu Anisa Septiningrum, A.Md.   | Juru Sita Pengganti                   | Penata III/c                |
| 123. | Maryatul Qubro                  | Juru Sita Pengganti                   | Penata Muda Tingkat I III/b |
| 124. | Subagyo                         | Juru Sita Pengganti                   | Penata Muda Tingkat I III/b |
| 125. | Eni Wijayanti                   | Juru Sita Pengganti                   | Penata Muda Tingkat I III/b |
| 126. | Elfriede, S.E., S.H.            | Operator - Penata Layanan Operasional | Penata Muda Tingkat I III/b |
| 127. | Mayank Ganda Sari, S.H.         | Klerek - Analisis Perkara Peradilan   | Penata Muda Tingkat I III/b |
| 128. | Maya Kartika Laksmiwati, S.E.   | Operator - Penata Layanan Operasional | Penata Muda Tingkat I III/b |
| 129. | Adhi Firzia Mihram              | Juru Sita Pengganti                   | Penata Muda Tingkat I III/b |
| 130. | Hapid                           | Juru Sita Pengganti                   | Penata Muda III/a           |
| 131. | Muali Subah, S.H.               | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | Penata Muda III/a           |
| 132. | Krido Sasmita A.M. Sakali, S.H. | Klerek - Analisis Perkara Peradilan   | Penata Muda III/a           |
| 133. | Rahmat Sihombing, S.H.          | Klerek - Analisis Perkara Peradilan   | Penata Muda III/a           |
| 134. | Daniera Wulanjani, S.H.         | Klerek - Analisis Perkara Peradilan   | Penata Muda III/a           |

|      |                                       |                                       |                         |
|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 135. | Idzni Maizani, S.Kom.                 | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | Penata Muda III/a       |
| 136. | Rachmatdani Dlabit Prakoso            | Juru Sita Pengganti                   | Penata Muda III/a       |
| 137. | Hotmaida Nainggolan, S.H.             | Klerek - Analis Perkara Peradilan     | Penata Muda III/a       |
| 138. | Evellia Lofita Dini, S.H.             | Klerek - Analis Perkara Peradilan     | Penata Muda III/a       |
| 139. | Anhar Septa Karindra                  | Klerek - Pengadministrasi Perkantoran | Pengatur Tingkat I II/d |
| 140. | Marbunga Ropita Simanullang, A.Md.Ak. | Klerek - Pengolah Data dan Informasi  | Pengatur Tingkat I II/d |
| 141. | Ziyadatul Ihsan, A.Md.                | Klerek - Pengolah Data dan Informasi  | Pengatur Tingkat I II/d |
| 142. | Chintya Arnella Purba, A.Md.          | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | Pengatur II/c           |
| 143. | Dawih Ramdani                         | Klerek - Pengadministrasi Perkantoran | Pengatur II/c           |
| 144. | Apriyanti Siboro, A.Md.               | Klerek - Pengadministrasi Perkantoran | Pengatur II/c           |
| 145. | Tozi Supriadi, A.Md.                  | Klerek - Pengadministrasi Perkantoran | Pengatur II/c           |
| 146. | Ekanora Malau, A.Md.                  | Klerek - Pengadministrasi Perkantoran | Pengatur II/c           |
| 147. | Nurkhayatin, A.Md.A.B.                | Klerek - Dokumentalis Hukum           | Pengatur II/c           |

Tabel 15  
 Profil Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja  
 Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus

| No | Nama                         | Jabatan                               | Golongan/<br>Pangkat |
|----|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 1. | Nurul Fadluh, S.E.           | Operator - Penata Layanan Operasional | IX                   |
| 2. | Susi Pristiya Agustina, S.S. | Operator - Penata Layanan Operasional | IX                   |

|     |                                    |                                       |     |
|-----|------------------------------------|---------------------------------------|-----|
| 3.  | Rizky Juniansyah Asshidqiq, S.Kom. | Operator - Penata Layanan Operasional | IX  |
| 4.  | Adianto, S.H.                      | Operator - Penata Layanan Operasional | IX  |
| 5.  | Aji Kurniawan, S.Kom.              | Operator - Penata Layanan Operasional | IX  |
| 6.  | Bayu Baskoro, S.H.                 | Operator - Penata Layanan Operasional | IX  |
| 7.  | Reza Fahlevi, S.H.                 | Operator - Penata Layanan Operasional | IX  |
| 8.  | Andriyanto, S.H.                   | Operator - Penata Layanan Operasional | IX  |
| 9.  | Rifki Maulana Ardiansyah, A.Md.    | Pengelola Layanan Operasional         | VII |
| 10. | Deni Rohmana, A.Md.                | Pengelola Layanan Operasional         | VII |
| 11. | Ardiansyah                         | Operator Layanan Operasional          | V   |
| 12. | Wawa Juarsa                        | Operator Layanan Operasional          | V   |
| 13. | M. Mikail Rizky Ramadhan           | Operator Layanan Operasional          | V   |
| 14. | Andi Fardian                       | Operator Layanan Operasional          | V   |
| 15. | Agus Partono                       | Operator Layanan Operasional          | V   |
| 16. | Apriansyah                         | Operator Layanan Operasional          | V   |
| 17. | Mahmudin                           | Operator Layanan Operasional          | V   |
| 18. | Ali Imron                          | Operator Layanan Operasional          | V   |
| 19. | Bremy Raharjo                      | Operator Layanan Operasional          | V   |
| 20. | Herni                              | Operator Layanan Operasional          | V   |
| 21. | Irpan Nurhadi                      | Operator Layanan Operasional          | V   |
| 22. | Suwandi                            | Pengelola Umum Operasional            | I   |
| 23. | Andi Setiawan                      | Pengelola Umum Operasional            | I   |
| 24. | Robih Sugara                       | Pengelola Umum Operasional            | I   |
| 25. | Sarman                             | Pengelola Umum Operasional            | I   |
| 26. | Jamaludin                          | Pengelola Umum Operasional            | I   |

#### A. MUTASI

Daftar hakim dan pegawai pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus yang menerima mutasi alih tugas selama tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 16

Mutasi Masuk Alih Tugas pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus

| No | Nama                           | Mutasi Masuk              |                           | Keterangan<br>(Terhitung Mulai Tanggal) |
|----|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
|    |                                | Jabatan Sebelum           | Jabatan Setelah           |   |
| 1  | Franklin B. Tamara, S.H., M.H. | Hakim PN. Makassar        | Hakim PN. Tangerang       | 28-02-2025                              |
| 2  | Taryan Setiawan, S.H., M.H.    | Hakim PN. Bandung         | Hakim PN. Tangerang       | 20-11-2025                              |
| 3  | Budiansyah, S.H., M.H.         | Ketua PN. Jember          | Wakil Ketua PN. Tangerang | 04-11-2025                              |
| 4  | Kamijon, S.H.                  | Hakim PN. Jakarta Selatan | Hakim PN. Tangerang       | 23-06-2025                              |
| 5  | Erry Iriawan, S.H.             | Hakim PN. Jakarta Utara   | Hakim PN. Tangerang       | 23-06-2025                              |
| 6  | Basuki Wiyono, S.H.            | Hakim PN. Bekasi          | Hakim PN. Tangerang       | 13-11-2025                              |

|    |   |                                      |                                    |            |
|----|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------|
| 7  | Baik Mustikawati, S.H.                      | Panitera Pengganti PN. Jakarta Barat | Panitera Pengganti PN. Tangerang   | 22-09-2025 |
| 8  | Eddy Cahyono, S.H., M.H.                    | Hakim PN. Palembang                  | Hakim PN. Tangerang                | 17-11-2025 |
| 9  | Edi Junaedi, S.H.                           | Hakim PN. Jakarta Utara              | Hakim PN. Tangerang                | 19-06-2025 |
| 10 | Sapto Supriyono, S.H., M.H.                 | Hakim PN. Jakarta Barat              | Hakim PN. Tangerang                | 26-05-2025 |
| 11 | Rotua Roosa Mathilda Tampubolon, S.H., M.H. | Panitera PN. Denpasar                | Panitera PN. Tangerang             | 26-06-2025 |
| 12 | Raden Mar Suprpto, S.H.                     | Ketua PN. Kalabahi                   | Hakim PN. Tangerang                | 11-11-2025 |
| 13 | Iwan Wardhana, S.H., M.H.                   | Hakim PN. Jakarta Barat              | Hakim PN. Tangerang                | 26-05-2025 |
| 14 | Toni Irfan, S.H.                            | Hakim PN. Jakarta Pusat              | Hakim PN. Tangerang                | 18-06-2025 |
| 15 | Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H.             | Hakim PN. Semarang                   | Hakim PN. Tangerang                | 17-10-2025 |
| 16 | Harun Yulianto, S.H.                        | Hakim PN. Palembang                  | Hakim PN. Tangerang                | 24-11-2025 |
| 17 | I Nyoman Wiguna, S.H., M.H.                 | Ketua PN. Denpasar                   | Wakil Ketua PN. Tangerang          | 29-05-2025 |
| 18 | Flowery Yulidas, S.H., M.H.                 | Hakim PN. Jakarta Barat              | Hakim PN. Tangerang                | 26-05-2025 |
| 19 | Dedi Irawan, S.H.                           | Panitera Muda PN. Serang             | Panitera Muda Hukum PN. Tangerang  | 07-02-2025 |
| 20 | Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.                | Hakim PN. Makassar                   | Hakim PN. Tangerang                | 17-11-2025 |
| 21 | Said Husein, S.H., M.H.                     | Hakim PN. Jakarta Timur              | Hakim PN. Tangerang                | 19-06-2025 |
| 22 | Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.             | Hakim PN. Denpasar                   | Hakim PN. Tangerang                | 24-11-2025 |
| 23 | Dr. Abdul Aziz, S.H., M.H.                  | Ketua PN. Mempawah                   | Hakim PN. Tangerang                | 31-10-2025 |
| 24 | Jan Oktavianus, S.H., M.H.                  | Hakim PN. Jakarta Selatan            | Hakim PN. Tangerang                | 21-11-2025 |
| 25 | Hendra Yuristiawan, S.H., M.H.              | Hakim PN. Jakarta Selatan            | Hakim PN. Tangerang                | 23-06-2025 |
| 26 | Ahmad Husaini, S.H.                         | Ketua PN. Buntok                     | Hakim PN. Tangerang                | 17-11-2025 |
| 27 | Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.      | Hakim PN. Bekasi                     | Hakim PN. Tangerang                | 17-10-2025 |
| 28 | Donny Dortmund, S.H., M.H.                  | Hakim PN. Jakarta Timur              | Hakim PN. Tangerang                | 19-06-2025 |
| 29 | Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H.            | Hakim PN. Jakarta Pusat              | Hakim PN. Tangerang                | 01-11-2025 |
| 30 | Derit Werdiningsih, S.H.                    | Ketua PN. Koba                       | Hakim PN. Tangerang                | 01-11-2025 |
| 31 | Andre, S.H.                                 | Panitera Pengganti PN. Jakarta Pusat | Panitera Pengganti PN. Tangerang   | 22-09-2025 |
| 32 | Guntur Nurjadi, S.H.                        | Ketua PN. Ketapang                   | Hakim PN. Tangerang                | 06-11-2025 |
| 33 | A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.   | Ketua PN. Magelang                   | Hakim PN. Tangerang                | 07-11-2025 |
| 34 | Welly Kriwara, S.H., M.H.                   | Juru Sita PN. Cianjur                | Juru Sita PN. Cianjur              | 01-09-2025 |
| 35 | Jefry Novirza, S.H.                         | Panitera Pengganti PN. Serang        | Panitera Pengganti PN. Tangerang   | 01-10-2025 |
| 36 | Husna Machmud, S.H., M.H.                   | Panitera Muda PN. Bogor              | Panitera Muda Pidana PN. Tangerang | 17-09-2025 |
| 37 | Fitri Ichtiyanto, S.H.                      | Panitera Pengganti PN. Serang        | Panitera Pengganti PN. Tangerang   | 01-10-2025 |

Tabel 17

## Mutasi Keluar Alih Tugas pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus

| No | Nama                                   | MUTASI KELUAR                                       |  | Keterangan<br>(Terhitung Mulai Tanggal) |
|----|--|---|--|---|
|    |  | Jabatan Sebelum                                     | Jabatan Setelah  |   |
| 1  | Suprayogi, S.H., M.H.                  | Hakim PN. Tangerang                                 | Hakim PN. Sidoarjo   | 18 Februari 2025                        |
| 2  | Dr. Fahmiron, S.H., M.Hum.             | Ketua PN. Tangerang                                 | Hakim Tinggi PT. Denpasar  | 26-05-2025                              |
| 3  | Endang Purwaningsih, S.H., M.H.        | Panitera Muda Perdata PN. Tangerang                 | Panitera Muda Pidana PN. Jakarta Barat                               | 05-02-2025                              |
| 4  | Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.H.   | Hakim PN. Tangerang                                 | Hakim Tinggi PT. Mataram   | 23-05-2025                              |
| 5  | I Nyoman Wiguna, S.H., M.H.            | Wakil Ketua PN. Tangerang                           | Ketua PN. Palembang  | 31-10-2025                              |
| 6  | Yuli Agus Santoso Prayitno. S.H.       | Panitera Pengganti PN. Tangerang                    | Panitera Pengganti PN. Jakarta Barat                                 | 22-09-2025                              |
| 7  | Dr. Tantri Yanti Muhammad, S.H., M.H.  | Panitera PN. Tangerang                              | Panitera PN. Bekasi  | 25-06-2025                              |
| 8  | Ali Murdiat, S.H., M.H.                | Hakim PN. Tangerang                                 | Wakil Ketua PN. Sekayu   | 10-11-2025                              |
| 9  | Nasrulloh, S.H.                        | Analisis Perkara Peradilan PN. Tangerang            | Analisis Perkara Peradilan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI            | 11-11-2025                              |
| 10 | Andri Falahandika, S.H., M.H.          | Hakim PN. Tangerang                                 | Wakil Ketua PN. Cikarang   | 07-11-2025                              |
| 11 | Ahadi Budiarto, S.H.                   | Panitera Pengganti PN. Tangerang                    | Panitera Pengganti PN. Jakarta Pusat                                 | 22-09-2025                              |
| 12 | Fakhrudin, S.H., M.H.                  | Hakim PN. Tangerang                                 | Hakim PN. Jakarta Barat  | 12-06-2025                              |
| 13 | Adek Nurhadi, S.H.                     | Hakim PN. Tangerang                                 | Hakim PN. Jakarta Pusat  | 01-07-2025                              |
| 14 | Iwan Taruna, S.H.                      | Juru Sita PN. Tangerang                             | Juru Sita PN. Jakarta Selatan  | 01-09-2025                              |
| 15 | Syahrir, S.H., M.H.                    | Panitera Pengganti PN. Tangerang                    | Panitera Pengganti PN. Jakarta Utara                                 | 22-09-2025                              |
| 16 | M. Yusuf Shahaluddin, S.T., S.H., M.H. | Panitera Muda Perdata PN. Tangerang                 | Panitera Muda Pidana PN. Jakarta Selatan                             | 12-09-2025                              |
| 17 | Novy Prihastuti, S.H.                  | Operator – Penata Layanan Operasional PN. Tangerang | Operator – Penata Layanan Operasional Kepaniteraan Mahkamah Agung RI | 11-11-2025                              |
| 18 | Minati Indriani, S.H., M.H.            | Panitera Pengganti PN. Tangerang                    | Panitera Pengganti PN. Jakarta Selatan                               | 22-09-2025                              |
| 19 | Estinna Darmawan Hermanto. S.H.,       | Analisis Perkara Peradilan PN. Tangerang            | Hakim PN. Prabumulih   | 25-07-2025                              |
| 20 | Zita Humairoh, S.H.                    | Analisis Perkara Peradilan PN. Tangerang            | Hakim PN. Jeneponto  | 25-06-2025                              |
| 21 | Ghesa Agnanto Hutomo, S.H.             | Analisis Perkara Peradilan PN. Tangerang            | Hakim PN. Namlea   | 23-06-2025                              |

|    |                                      |  |                         |            |
|----|--------------------------------------|--|-------------------------|------------|
| 22 | Deny Gomgom Ranomutua Silalahi, S.H. | Analisis Perkara Peradilan PN. Tangerang | Hakim PN. Tobelo        | 25-06-2025 |
| 23 | Dwi Hastuti Nurjanah, S.H.           | Analisis Perkara Peradilan PN. Tangerang | Hakim PN. Kuala Tungkal | 23-06-2025 |
| 24 | Ulul Azmi, S.H.                      | Analisis Perkara Peradilan PN. Tangerang | Hakim PN. Marabahan     | 23-06-2025 |
| 25 | Muhammad Aljabbar Putra, S.H.        | Analisis Perkara Peradilan PN. Tangerang | Hakim PN. Lembata       | 30-06-2025 |
| 26 | Nadia Rufaidah, S.H.                 | Analisis Perkara Peradilan PN. Tangerang | Hakim PN. Sarolangun    | 23-06-2025 |
| 27 | Mercy Monica Yolanda, S.H.           | Analisis Perkara Peradilan PN. Tangerang | Hakim PN. Kotobaru      | 19-06-2025 |

## B. PROMOSI

Daftar hakim dan pegawai pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus yang dipromosikan selama tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 18

### Promosi pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus

| No | Nama                            | PROMOSI                   |                           | Keterangan (Terhitung Mulai Tanggal) |
|----|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|    |                                 | Jabatan Sebelum           | Jabatan Setelah           |                                      |
| 1  | M. Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H. | Wakil Ketua PN. Tangerang | Ketua PN. Tangerang       | 28-05-2025                           |
| 2  | I Nyoman Wiguna, S.H., M.H.     | Wakil Ketua PN. Tangerang | Ketua PN. Palembang       | 31-10-2025                           |
| 3  | Dr. Fahmiron, S.H., M.Hum.      | Ketua PN. Tangerang       | Hakim Tinggi PT. Denpasar | 26-05-2025                           |

## C. PENSIUN

Daftar pegawai pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus yang pensiun selama tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 19

### Daftar Pegawai Pensiun pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus

| No | Nama                        | Keterangan (Terhitung Mulai Tanggal) |
|----|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1  | Indri Murtini, S.H., M.H.   | 01-01-2025                           |
| 2  | Tuti Wildhani, S.H.         | 01-09-2025                           |
| 3  | Tati Doresly Simamora, S.H. | 01-11-2025                           |
| 4  | Azmilena, S.H.              | 01-01-2025                           |
| 5  | Burhanuddin                 | 01-05-2025                           |
| 6  | Tri Widiati, S.H.           | 01-06-2025                           |
| 7  | Didi Suhendi                | 01-11-2025                           |

#### D. DIKLAT (SDM TEKNIS/NON TEKNIS)

Daftar diklat (SDM Teknis/Non Teknis) pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus yang dilaksanakan selama tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 20

Daftar Pegawai Yang Mengikuti Diklat (SDM Teknis)

| NO. | NAMA                                    | NAMA DIKLAT   |
|-----|---|---|
| 1.  | Andri Falahandika Ansyahrul, S.H., M.H. | <i>Knowledge Sharing System e-Learning</i> pada Kementerian Keuangan untuk program Badilum Learning Center (BLC)    |
| 2.  | Forci Nilpa Darma, S.H., M.H.           | Pelatihan Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Hakim   |
| 3.  | Rachmat Budiyanto                       | Sosialisasi Penerapan MFA pada Platform ASN Digital BKN   |
| 4.  | Ike Rustiati, S.H.                      | Sosialisasi Penerapan MFA pada Platform ASN Digital BKN   |
| 5.  | Novy Prihastuti, S.H.                   | Sosialisasi Penerapan MFA pada Platform ASN Digital BKN   |
| 6.  | Maya Kartika Laksmiwati, S.E.           | Sosialisasi Penerapan MFA pada Platform ASN Digital BKN   |
| 7.  | M. Toufan Putra Pratama, S.E            | Sosialisasi Pengelolaan Gaji Induk, Cash Management dan pengelolaan keuangan APBN Tahun 2025                        |
| 8.  | Ziyadatul Ihsan, A.Md.                  | Sosialisasi Pengelolaan Gaji Induk, Cash Management dan pengelolaan keuangan APBN Tahun 2025                        |
| 9.  | Dessy Herliani, S.Sos.                  | Sosialisasi Kebijakan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Negara  |
| 10. | M. Toufan Putra Pratama, S.E            | Sosialisasi Kebijakan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Negara  |
| 11. | M. Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H.         | Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) Seluruh Indonesia |
| 12. | Dr. I Nyoman Wiguna, S.H., M.H.         | Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) Seluruh Indonesia |
| 13. | Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum.        | Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) Seluruh Indonesia |
| 14. | Saidin Bagariang, S.H.                  | Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) Seluruh Indonesia |
| 15. | Agung Suhendro, S.H., M.H.              | Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) Seluruh Indonesia |
| 16. | Fathul Mujib, S.H., M.H.                | Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) Seluruh Indonesia |

| NO. | NAMA   | NAMA DIKLAT   |
|-----|--|---|
| 17. | Lucky Rombot Kalalo, S.H., M.H.                          | Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) Seluruh Indonesia |
| 18. | Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum.                               | Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) Seluruh Indonesia |
| 19. | Ismail Hidayat, S.H., M.H.                               | Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) Seluruh Indonesia |
| 20. | Mangapul Girsang, S.H.                                   | Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) Seluruh Indonesia |
| 21. | R. R. Endang Dwi Handayani, S.H., M.H.                   | Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) Seluruh Indonesia |
| 22. | Tongam Oase Christian Hasudungan Simanjuntak, S.H., M.H. | Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) Seluruh Indonesia |
| 23. | Beslin Sihombing, S.H., M.H.                             | Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) Seluruh Indonesia |
| 24. | Wadji Pramono, S.H., M.H.                                | Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) Seluruh Indonesia |
| 25. | Santosa, S.H., M.H.                                      | Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) Seluruh Indonesia |
| 26. | Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H.                         | Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) Seluruh Indonesia |
| 27. | Masduki, S.H.  | Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) Seluruh Indonesia |
| 28. | Novita Riama, S.H., M.H.                                 | Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) Seluruh Indonesia |
| 29. | Yandri Roni, S.H., M.H.                                  | Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) Seluruh Indonesia |
| 30. | Kony Hartanto, S.H., M.H.                                | Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) Seluruh Indonesia |
| 31. | Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.                           | Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) Seluruh Indonesia |
| 32. | Ali Murdiat, S.H., M.H.                                  | Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) Seluruh Indonesia |
| 33. | Iriaty Khairul Ummah, S.H.                               | Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) Seluruh Indonesia |

| NO. | NAMA                             | NAMA DIKLAT   |
|-----|----------------------------------|---|
| 34. | Forci Nilpa Darma. S.H., M.H.    | Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) Seluruh Indonesia   |
| 35. | Martua Sagala, S.H., M.H.        | Seminar Ilmiah dengan tema "Optimalisasi pendekatan <i>Asset dan Follow The Money</i> " melalui <i>Deffered Prosecution Agreement</i> " dalam penanganan Perkara Pidana |
| 36. | Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H. | Seminar Ilmiah dengan tema "Optimalisasi pendekatan <i>Asset dan Follow The Money</i> " melalui <i>Deffered Prosecution Agreement</i> " dalam penanganan Perkara Pidana |
| 37. | Ali Murdiat, S.H., M.H.          | Seminar Ilmiah dengan tema "Optimalisasi pendekatan <i>Asset dan Follow The Money</i> " melalui <i>Deffered Prosecution Agreement</i> " dalam penanganan Perkara Pidana |
| 38. | Dini Damayanti, S.H.             | Seminar Ilmiah dengan tema "Optimalisasi pendekatan <i>Asset dan Follow The Money</i> " melalui <i>Deffered Prosecution Agreement</i> " dalam penanganan Perkara Pidana |
| 39. | Forci Nilpa Darma, S.H., M.H.    | Seminar Ilmiah dengan tema "Optimalisasi pendekatan <i>Asset dan Follow The Money</i> " melalui <i>Deffered Prosecution Agreement</i> " dalam penanganan Perkara Pidana |
| 40. | Kamijon, S.H.                    | Seminar Ilmiah dengan tema "Optimalisasi pendekatan <i>Asset dan Follow The Money</i> " melalui <i>Deffered Prosecution Agreement</i> " dalam penanganan Perkara Pidana |
| 41. | Toni Irfan, S.H.                 | Seminar Ilmiah dengan tema "Optimalisasi pendekatan <i>Asset dan Follow The Money</i> " melalui <i>Deffered Prosecution Agreement</i> " dalam penanganan Perkara Pidana |
| 42. | Dony Dortmund, S.H., M.H.        | Seminar Ilmiah dengan tema "Optimalisasi pendekatan <i>Asset dan Follow The Money</i> " melalui <i>Deffered Prosecution Agreement</i> " dalam penanganan Perkara Pidana |
| 43. | Hendra Yuristiawan, S.H.         | Seminar Ilmiah dengan tema "Optimalisasi pendekatan <i>Asset dan Follow The Money</i> " melalui <i>Deffered Prosecution Agreement</i> " dalam penanganan Perkara Pidana |
| 44. | Lia Marlia, S.H., M.H.           | Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia  |
| 45. | Candra Dewi, S.H.                | Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia  |
| 46. | Rizqi Isma Apriyani, S.H., M.H.  | Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia  |
| 47. | Fitri Ictiyanto, S.H., M.H.      | Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia  |
| 48. | Dhesga Selano Margen, S.H.       | Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti  |

| NO. | NAMA                                      | NAMA DIKLAT  |
|-----|---|--|
|     |   | Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia  |
| 49. | Mouna Claudia Camelia Caligis, S.H., M.H. | Pelatihan Teknis Yudisial Juru Sita Peradilan Umum Seluruh Indonesia   |
| 50. | Winny Yoanda Walujo, S.E., M.H.           | Pelatihan Teknis Yudisial Juru Sita Peradilan Umum Seluruh Indonesia   |
| 51. | Welly Kriwara, S.H., M.H.                 | Pelatihan Teknis Yudisial Juru Sita Peradilan Umum Seluruh Indonesia   |
| 52. | Alicia Tri Wardhani, S.H.                 | Pelatihan Teknis Yudisial Juru Sita Peradilan Umum Seluruh Indonesia   |
| 53. | Dedy Purwanto, S.H.                       | Pelatihan Teknis Yudisial Juru Sita Peradilan Umum Seluruh Indonesia   |
| 54. | Ziyadatul Ihsan, A.Md.                    | Bimbingan Teknis Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Semester I Tahun 2025 dan Sosialisasi Standar Manajemen dan Penguatan Integritas KPPN |

Tabel 21

Daftar Pegawai Yang Mengikuti Diklat (SDM Non Teknis)

| NO. | NAMA  | NAMA DIKLAT  |
|-----|---|--|
| 1.  | M. Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H.             | e-learning peningkatan pemahaman gratifikasi pada LMS ACLC-KPK |
| 2.  | Dr. I Nyoman Wiguna, S.H., M.H.             | e-learning peningkatan pemahaman gratifikasi pada LMS ACLC-KPK |
| 3.  | Rotua Roosa Mathilda Tampubolon, S.H., M.H. | e-learning peningkatan pemahaman gratifikasi pada LMS ACLC-KPK |
| 4.  | Zulfikar Arif Rahman Purba, S.E., M.M.      | e-learning peningkatan pemahaman gratifikasi pada LMS ACLC-KPK |
| 5.  | Adianto, S.H.                               | MOOC Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025     |
| 6.  | Aji Kurniawan, S.Kom.                       | MOOC Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025     |
| 7.  | Andriyanto, S.H.                            | MOOC Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025     |
| 8.  | Bayu Baskoro, S.H.                          | MOOC Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025     |
| 9.  | Nurul Fadluh, S.E.                          | MOOC Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025     |
| 10. | Reza Pahlevi, S.H.                          | MOOC Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025     |
| 11. | Risky Juniansyah Asshiddiq, S.Kom.          | MOOC Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025     |
| 12. | Susi Pristiya Agustina, S.S.                | MOOC Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025     |
| 13. | Deni Rohmana, A.Md.                         | MOOC Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025     |
| 14. | Rifki Maulana Ardiansyah, A.Md.             | MOOC Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025     |

| NO. | NAMA                               | NAMA DIKLAT   |
|-----|------------------------------------|---|
| 15. | Agus Partono                       | MOOC Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025    |
| 16. | Ali Imron                          | MOOC Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025    |
| 17. | Andi Fardian                       | MOOC Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025    |
| 18. | Apriansyah                         | MOOC Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025    |
| 19. | Ardiansyah                         | MOOC Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025    |
| 20. | Bremy Raharjo                      | MOOC Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025    |
| 21. | Herni                              | MOOC Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025    |
| 22. | Irpan Nurhadi                      | MOOC Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025    |
| 23. | Mahmudin                           | MOOC Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025    |
| 24. | M. Mikail Rizky Ramadhan           | MOOC Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025    |
| 25. | Wawa Juarsa                        | MOOC Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025    |
| 26. | Andi Setiawan                      | MOOC Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025    |
| 27. | Jamaludin                          | MOOC Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025    |
| 28. | Robih Sugara                       | MOOC Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025    |
| 29. | Suwandi                            | MOOC Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025    |
| 30. | Adianto, S.H.                      | Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap II |
| 31. | Aji Kurniawan, S.Kom.              | Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap II |
| 32. | Andriyanto, S.H.                   | Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap II |
| 33. | Bayu Baskoro, S.H.                 | Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap II |
| 34. | Nurul Fadluh, S.E.                 | Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap II |
| 35. | Reza Pahlevi, S.H.                 | Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap II |
| 36. | Risky Juniansyah Asshiddiq, S.Kom. | Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap II |
| 37. | Susi Pristiya Agustina, S.S.       | Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap II |
| 38. | Deni Rohmana, A.Md.                | Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap II |
| 39. | Rifki Maulana Ardiansyah, A.Md.    | Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap II |

| NO. | NAMA                             | NAMA DIKLAT   |
|-----|----------------------------------|---|
| 40. | Agus Partono                     | Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap II |
| 41. | Ali Imron                        | Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap II |
| 42. | Andi Fardian                     | Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap II |
| 43. | Apriansyah                       | Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap II |
| 44. | Ardiansyah                       | Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap II |
| 45. | Bremy Raharjo                    | Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap II |
| 46. | Herni                            | Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap II |
| 47. | Irpan Nurhadi                    | Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap II |
| 48. | Mahmudin                         | Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap II |
| 49. | M. Mikail Rizky Ramadhan         | Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap II |
| 50. | Wawa Juarsa                      | Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap II |
| 51. | Andi Setiawan                    | Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap II |
| 52. | Jamaludin                        | Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap II |
| 53. | Robih Sugara                     | Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap II |
| 54. | Suwandi                          | Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap II |
| 55. | Hotmaida Nainggolan, S.H.        | Pelatihan Dasar CPNS  |
| 56. | Evellia Lovita Dini, S.H.        | Pelatihan Dasar CPNS  |
| 57. | Apriyanti Siboro, A.Md.          | Pelatihan Dasar CPNS  |
| 58. | Tozi Supriadi, A.Md.             | Pelatihan Dasar CPNS  |
| 59. | Ekanora Malau, A.Md.             | Pelatihan Dasar CPNS  |
| 60. | Nurkhayatin, A.Md.A.B.           | Pelatihan Dasar CPNS  |
| 61. | Adhi Firzia Mihram               | Pelatihan Aplikasi Canva Dalam Pengelolaan Media Sosial       |
| 62. | Ali Imron                        | Pelatihan Aplikasi Canva Dalam Pengelolaan Media Sosial       |
| 63. | Bayu Baskoro, S.H.               | Pelatihan Aplikasi Canva Dalam Pengelolaan Media Sosial       |
| 64. | Dessy Herliani, S.Sos.           | Pelatihan Aplikasi Canva Dalam Pengelolaan Media Sosial       |
| 65. | Dewi Martiani Wulansari, S.H.    | Pelatihan Aplikasi Canva Dalam Pengelolaan Media Sosial       |
| 66. | Dwi Seftia Ningsih               | Pelatihan Aplikasi Canva Dalam Pengelolaan Media Sosial       |
| 67. | Ike Rustiati, S.H.               | Pelatihan Aplikasi Canva Dalam Pengelolaan Media Sosial       |
| 68. | Jamaludin                        | Pelatihan Aplikasi Canva Dalam Pengelolaan Media Sosial       |
| 69. | H. Rachmat Budiyanto             | Pelatihan Aplikasi Canva Dalam Pengelolaan Media Sosial       |
| 70. | Diniarti Mayaciptani, S.E., M.M. | Pelatihan Aplikasi Canva Dalam Pengelolaan Media Sosial       |
| 71. | Mahmudin                         | Pelatihan Aplikasi Canva Dalam Pengelolaan Media Sosial       |
| 72. | Maya Kartika Laksmiwati, S.E.    | Pelatihan Aplikasi Canva Dalam Pengelolaan Media Sosial       |
| 73. | M. Mikail Rizky Ramadhan         | Pelatihan Aplikasi Canva Dalam Pengelolaan Media Sosial       |
| 74. | Nurkhayatin, A.Md.A.B            | Pelatihan Aplikasi Canva Dalam Pengelolaan Media Sosial       |

| NO. | NAMA                                       | NAMA DIKLAT   |
|-----|--|---|
| 75. | Reza Pahlevi, S.H.                         | Pelatihan Aplikasi Canva Dalam Pengelolaan Media Sosial |
| 76. | Rifki Maulana Ardiansyah, A.Md,            | Pelatihan Aplikasi Canva Dalam Pengelolaan Media Sosial |
| 77. | Robih Sugara                               | Pelatihan Aplikasi Canva Dalam Pengelolaan Media Sosial |
| 78. | Rudi Dwi Kurniawan, S.T.                   | Pelatihan Aplikasi Canva Dalam Pengelolaan Media Sosial |
| 79. | Sarman                                     | Pelatihan Aplikasi Canva Dalam Pengelolaan Media Sosial |
| 80. | Zulfirkar Arif Rahman Purba,<br>S.H., M.M. | Pelatihan Aplikasi Canva Dalam Pengelolaan Media Sosial |
| 81. | Henny Fitria, S.E.                         | Pelatihan Aplikasi Canva Dalam Pengelolaan Media Sosial |

## BAB IV

### PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

#### A. PENGELOLAAN KEUANGAN

##### 1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

###### a) Belanja Pegawai

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Pegawai dalam DIPA 01 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 22

Rekapitulasi Belanja Pegawai

| No. | Satker  | Pagu (Rp)      | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp)   | Persentase Realisasi (%) |
|-----|---|----------------|----------------|-------------|--------------------------|
| 1   | Pengadilan Negeri<br>Tangerang Kelas 1A<br>Khusus | 30.607.708.000 | 29.872.873.641 | 734.834.259 | 97,60                    |

Tabel 23

Rincian Realisasi Belanja Pegawai

| No. | Kode Akun | Jenis Belanja                        | Pagu (Rp)      | Realisasi (Rp) | Persentase Realisasi (%) |
|-----|-----------|--------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 1   | 511111    | Belanja Gaji Pokok PNS               | 8.496.046.000  | 8.400.101.700  | 98,87                    |
| 2   | 511119    | Belanja Pembulatan Gaji PNS          | 110.000        | 98.347         | 89,41                    |
| 3   | 511121    | Belanja Tunj. Suami/Istri PNS        | 596.773.000    | 591.518.516    | 99,12                    |
| 4   | 511122    | Belanja Tunj. Anak PNS               | 167.485.000    | 164.861.821    | 98,43                    |
| 5   | 511123    | Belanja Tunj. Struktural PNS         | 115.290.000    | 65.290.000     | 56,63                    |
| 6   | 511124    | Belanja Tunj Fungsional PNS          | 390.320.000    | 340.320.000    | 87,19                    |
| 7   | 511125    | Belanja Tunj. PPh PNS                | 45.137.000     | 43.132.306     | 95,56                    |
| 8   | 511126    | Belanja Tunj. Beras PNS              | 373.911.000    | 371.007.660    | 99,22                    |
| 9   | 511129    | Belanja Uang Makan PNS               | 1.212.280.000  | 1.177.993.000  | 97,17                    |
| 10  | 511151    | Belanja Tunj. Umum PNS               | 91.063.000     | 85.050.000     | 93,40                    |
| 11  | 511324    | Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara | 2.938.605.000  | 2.781.570.200  | 94,66                    |
| 12  | 511339    | Belanja Tunjangan Pejabat Negara     | 15.613.250.000 | 15.424.700.000 | 98,79                    |

|       |        |                                |                |                |       |
|-------|--------|--------------------------------|----------------|----------------|-------|
| 13    | 511611 | Belanja Gaji Pokok PPPK        | 274.700.000    | 274.661.600    | 99,99 |
| 14    | 511619 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK   | 6.000          | 5.507          | 91,78 |
| 15    | 511621 | Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK | 23.430.000     | 23.422.070     | 99,97 |
| 16    | 511622 | Belanja Tunj. Anak PPPK        | 7.940.000      | 7.939.054      | 99,99 |
| 17    | 511625 | Belanja Tunj. Beras PPPK       | 25.130.000     | 25.129.740     | 100   |
| 18    | 511628 | Belanja Tunj. Uang Makan PPPK  | 217.432.000    | 77.292.000     | 35,55 |
| 19    | 511633 | Belanja Tunj. Umum PPPK        | 18.800.000     | 18.780.000     | 99,89 |
| TOTAL |        |                                | 30.607.708.000 | 29.872.873.641 | 97,60 |

b) Belanja Barang

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Barang dalam DIPA 01 tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 24  
Rekapitulasi Belanja Barang DIPA 01

| NO. | SATKER                                      | PAGU (Rp)     | REALISASI (Rp) | SISA (Rp)  | Persentase Realisasi (%) |
|-----|---|---------------|----------------|------------|--------------------------|
| 1   | Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus | 3.473.624.000 | 3.447.387.185  | 26.236.815 | 99,24                    |

Tabel 25  
Rincian Realisasi Belanja Barang DIPA 01

| No. | Kode Akun | Jenis Belanja                             | Pagu (Rp)     | Realisasi (Rp) | Persentase Realisasi (%) |
|-----|-----------|---|---------------|----------------|--------------------------|
| 1   | 521111    | Belanja Keperluan Perkantoran             | 1.207.046.000 | 1.202.666.433  | 99,64                    |
| 2   | 521811    | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi | 104.160.000   | 104.093.575    | 99,94                    |
| 3   | 521114    | Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat  | 5.000.000     | 4.830.100      | 96,60                    |
| 4   | 521211    | Belanja Bahan                             | 300.000       | 300.000        | 100,00                   |
| 5   | 521252    | Belanja Peralatan dan Mesin               | 700.000       | 688.776        | 98,40                    |
| 6   | 522112    | Belanja Langganan Telepon                 | 1.572.000     | 1.373.736      | 87,39                    |
| 7   | 522119    | Belanja Langganan Lainnya                 | 207.600.000   | 207.600.000    | 100,00                   |
| 8   | 522141    | Belanja Sewa                              | 374.820.000   | 368.431.082    | 98,30                    |

|       |        |  |               |               |        |
|-------|--------|--|---------------|---------------|--------|
| 9     | 523111 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan         | 788.180.000   | 787.461.968   | 99,91  |
| 10    | 523119 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya | 151.200.000   | 151.031.000   | 99,89  |
| 11    | 521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya               | 10.500.000    | 10.473.060    | 99,74  |
| 12    | 523121 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin         | 498.580.000   | 492.346.455   | 98,75  |
| 13    | 521115 | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja           | 80.616.000    | 80.616.000    | 100,00 |
| 14    | 522191 | Belanja Jasa Lainnya                             | 1.600.000     | 1.600.000     | 100,00 |
| 15    | 524111 | Belanja Perjalanan Biasa                         | 39.500.000    | 32.225.000    | 81,58  |
| 16    | 524113 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota              | 2.250.000     | 1.650.000     | 73,33  |
| TOTAL |        |  | 3.473.624.000 | 3.447.387.185 | 99,24  |

## 2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Tahun 2025 Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus tidak mendapat Pagu Anggaran Belanja Modal dalam DIPA sehingga tidak tersedia anggaran untuk pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana bagi Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus. Namun ada mendapatkan hibah dari Bank Mitra berupa:

Tabel 26

### Data Barang Hibah dari Bank Mitra

| No | Nama Barang                | Jumlah Barang | Total       |
|----|----------------------------|---------------|-------------|
| 1  | Meja Kerja Besi/Metal      | 11            | 88.000.000  |
| 2  | Kursi Besi/Metal           | 11            | 39.765.000  |
| 3  | Roll Opek (40 Kompartemen) | 1             | 108.440.000 |
| 4  | Roll Opek (50 Kompartemen) | 1             | 133.810.000 |
| 5  | Roll Opek (80 Kompartemen) | 1             | 158.120.000 |
| 6  | Rak Besi                   | 13            | 35.000.000  |
| 7  | Lemari Besi/Metal          | 10            | 35.000.000  |
| 8  | Lemari Kayu                | 2             | 7.000.000   |
| 9  | A.C. Split 1 PK            | 3             | 16.500.000  |
| 10 | A.C. Split 2 PK            | 3             | 27.600.000  |
| 11 | Exhause Fan                | 3             | 8.100.000   |
| 12 | Microphone/ Wireless MIC   | 2             | 5.000.000   |
| 13 | Meja Kerja Besi/Metal      | 14            | 112.00.000  |
| 14 | Kursi Besi/Metal           | 14            | 50.610.000  |
| 15 | Lemari Besi/Metal          | 10            | 35.000.000  |
| 16 | A.C Split 2 PK             | 3             | 42.900.000  |

### 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

#### a) Belanja Barang

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Barang dalam DIPA 03 tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 27

Rekapitulasi Belanja Barang DIPA 03

| NO. | SATKER                                      | PAGU (Rp)   | REALISASI (Rp) | SISA (Rp)  | Persentase Realisasi (%) |
|-----|---|-------------|----------------|------------|--------------------------|
| 1   | Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus | 564.070.000 | 552.752.105    | 11.317.895 | 97,99                    |

Tabel 28

Rincian Realisasi Belanja Barang DIPA 03

| No.   | Kode Akun | Jenis Belanja                             | Pagu (Rp)   | Realisasi (Rp) | Persentase Realisasi (%) |
|-------|-----------|---|-------------|----------------|--------------------------|
| 1     | 521211    | Belanja Bahan                             | 187.162.000 | 185.680.000    | 99,21                    |
| 2     | 521811    | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi | 265.170.000 | 265.126.775    | 99,98                    |
| 3     | 524113    | Belanja Perjalanan Biasa dalam kota       | 750.000     | 750.000        | 100,00                   |
| 4     | 521114    | Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos        | 46.988.000  | 42.211.650     | 89,83                    |
| 5     | 522131    | Pos Bantuan Hukum                         | 64.000.000  | 58.983.680     | 92,16                    |
| TOTAL |           |   | 564.070.000 | 552.752.105    | 97,99                    |

#### 4. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Dalam kurun waktu tahun 2025 Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus memperoleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 29  
Rekapitulasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

| No                      | Kode Akun                                     | Uraian Jenis Pendapatan   | Jumlah Penerimaan (Rp) |
|-------------------------|---|---|------------------------|
| A.                      | Pendapatan DIPA 01 BUA (097598)               |   |                        |
|                         | 425129  | Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya                        | 43.537.900             |
|                         | 425131  | Pendapatan sewa tanah, Gedung, dan Bangunan                         | 194.627.175            |
|                         | 425151  | Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi       | 26.804.752             |
|                         | 425791  | Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai      | 15.600.000             |
|                         | 425839  | Pendapatan Denda Lainnya  | 296.899                |
|                         | 425911  | Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu         | 190.167                |
|                         | Sub Total Pendapatan DIPA 01 BUA (097598)     |   | 281.056.893            |
| B.                      | Pendapatan DIPA 03 Badilum (099077)           |   |                        |
|                         | 425231  | Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan                         | 1.060.000              |
|                         | 425232  | Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan | 54.420.000             |
|                         | 425233  | Pendapatan Ongkos Perkara   | 139.875.000            |
|                         | 425239  | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya                          | 344.002.500            |
|                         | Sub Total Pendapatan DIPA 03 Badilum (099077) |   | 539.357.500            |
| <b>TOTAL PENDAPATAN</b> |   |   | <b>820.414.393</b>     |

## **B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA**

Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus yang terletak di Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna No. 7 Tangerang diresmikan oleh Bapak Soehendro Hendarsin, S.H. sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Barat pada tanggal 07 Februari 1983. Saat ini Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus berdiri di atas tanah seluas 4.000 m<sup>2</sup> dan bangunan seluas 8.249 m<sup>2</sup>. Pembangunan gedung belakang Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus ditangani oleh kontraktor F.A. Chandra Putra, yang selesai pada tahun 2015.

Adapun yang telah kami lakukan untuk menunjang kinerja pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus antara lain:

1. Gedung Kantor
  - a) Pengadaan

Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus tidak terdapat anggaran pengadaan pembangunan gedung.

b) Pemeliharaan

Selama tahun anggaran 2025 telah dilaksanakan pemeliharaan:

- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp772.623.968,00.
- Belanja Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor Rp15.000.000,00.
- Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas (16 unit) senilai Rp151.031.000,00.

2. Prasarana Fasilitas Gedung

a) Pengadaan

Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus tidak terdapat anggaran pengadaan prasarana fasilitas gedung. Namun terdapat transfer masuk senilai Rp.21.750.000,00 dari Mahkamah Agung dan total hibah masuk senilai Rp.913.345.000,00 dari Bank BTN Cabang Tangerang.

b) Pemeliharaan

Dalam tahun anggaran 2025 telah dilaksanakan pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp492.346.455,00. Data pemeliharaan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 30

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

| NO    | Nama Barang               | Biaya (Rp)  |
|-------|---------------------------|-------------|
| 1     | Bahan Bakar Genset        | 3.280.000   |
| 2     | CCTV                      | 8.340.000   |
| 3     | Server dan Jaringan       | 5.000.000   |
| 4     | Mesin Jetpump             | 4.000.000   |
| 5     | APAR                      | 9.000.000   |
| 6     | Speaker Sound System      | 16.017.750  |
| 7     | kendaraan bermotor roda 4 | 205.359.331 |
| 8     | Kendaraan bermotor roda 2 | 20.069.200  |
| 9     | Komputer/PC               | 23.450.000  |
| 10    | Kamera                    | 1.881.000   |
| 11    | Videotron & Running Text  | 5.800.000   |
| 12    | Kipas                     | 5.000.000   |
| 13    | Televisi                  | 4.975.000   |
| 14    | pemeliharaan meublair     | 3.495.000   |
| 15    | laptop                    | 5.700.000   |
| 16    | AC Central                | 69.773.254  |
| 17    | AC Standing               | 8.963.260   |
| 18    | AC Split                  | 9.670.900   |
| 19    | Pemeliharaan Lift         | 37.074.000  |
| 20    | Pemeliharaan Genset       | 19.997.760  |
| 21    | printer                   | 25.500.000  |
| TOTAL |                           | 492.346.455 |

c) Penghapusan

Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus telah melakukan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yaitu:

- Penghapusan 1 (satu) unit Sepeda Motor, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:27519/SEK/SK.PL1.2.3/XI/2025.
- Dan sedang dalam proses penghapusan Peralatan dan Mesin berupa meubelair rusak berat yang sampai tanggal 31 Desember 2025 sudah sampai tahap usulan penghapusan melalui aplikasi e-sadewa ke Pengadilan Tinggi Banten sesuai dengan surat usulan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 794/SEK.PN.W29.U4/PL.1.2.3/XII/2025.

Pengelolaan sarana dan prasarana gedung Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus meliputi kendaraan dinas, gedung, alat pengolah data dan komunikasi, fasilitas perkantoran, dan rumah dinas. Berikut data terkait pengelolaan kendaraan dan rumah dinas dimaksud:

Tabel 31  
Kendaraan Dinas

| No.       | Uraian                        | Tahun Perolehan | Kondisi |              |             | *Keterangan   |
|-----------|-------------------------------|-----------------|---------|--------------|-------------|---------------|
|           |                               |                 | Baik    | Rusak Ringan | Rusak Berat |               |
| <b>A.</b> | <b>Jenis Kendaraan Roda 4</b> |                 |         |              |             |               |
| 1.        | Toyota Innova                 | 2009            | √       |              |             |               |
| 2.        | Toyota Innova                 | 2010            | √       |              |             |               |
| 3.        | Toyota Fortuner 2.4           | 2019            | √       |              |             |               |
| 4.        | Toyota Fortuner 2.4           | 2019            | √       |              |             |               |
| 5.        | Toyota Fortuner 2.4           | 2019            | √       |              |             |               |
| 6.        | Toyota Fortuner 2.4           | 2019            | √       |              |             |               |
| 7.        | Toyota Altis                  | 2024            | √       |              |             | *sewa dari MA |
| <b>B.</b> | <b>Jenis Kendaraan Roda 2</b> |                 |         |              |             |               |
| 1.        | Honda GLM II                  | 1997            |         | √            |             |               |
| 2.        | Honda NF 125                  | 2004            | √       |              |             |               |
| 3.        | Honda NF 125 SD               | 2005            | √       |              |             |               |
| 4.        | Honda Megapro                 | 2005            | √       |              |             |               |
| 5.        | Honda Vario 125 ISS           | 2022            | √       |              |             |               |
| 6.        | Honda Vario 125 ISS           | 2022            | √       |              |             |               |
| 7.        | Honda Vario 125 ISS           | 2022            | √       |              |             |               |
| 8.        | Honda Vario 125 ISS           | 2022            | √       |              |             |               |
| 9.        | Honda Vario 125 ISS           | 2023            | √       |              |             |               |
| 10.       | Honda Vario 125 ISS           | 2023            | √       |              |             |               |

Tabel 32  
Rumah Dinas

| No. | Uraian                      | Tahun Perolehan | Kondisi |              |             | Keterangan |
|-----|-----------------------------|-----------------|---------|--------------|-------------|------------|
|     |                             |                 | Baik    | Rusak Ringan | Rusak Berat |            |
| 1.  | Jalan Soleh Ali             | 2009            | √       |              |             |            |
| 2.  | Jalan K.H. Ashari           | 1985            |         | √            |             |            |
| 3.  | Jalan Kehakiman XII No. 94  | 1982            |         | √            |             |            |
| 4.  | Jalan Kehakiman XII No. 95  | 1982            |         | √            |             |            |
| 5.  | Jalan Kehakiman XII No. 96  | 1980            |         | √            |             |            |
| 6.  | Jalan Kehakiman XII No. 97  | 1981            |         | √            |             |            |
| 7.  | Jalan Kehakiman XII No. 98  | 1982            |         | √            |             |            |
| 8.  | Jalan Kehakiman XII No. 99  | 1977            |         | √            |             |            |
| 9.  | Jalan Kehakiman XII No. 100 | 1978            |         | √            |             |            |
| 10. | Jalan Pribadi No. 82        | 1985            |         | √            |             |            |
| 11. | Jalan Pribadi No. 83        | 1985            |         |              | √           |            |
| 12. | Jalan Sinar Hati No. 18     | 1985            |         | √            |             |            |
| 13. | Jalan Sinar Hati No. 19     | 1985            |         |              | √           |            |
| 14. | Jalan Pengayoman Raya No. 1 | 2008            |         |              | √           |            |
| 15. | Jalan Pengayoman Raya No. 2 | 2008            |         |              | √           |            |
| 16. | Jalan Pengayoman Raya No. 3 | 2008            |         |              | √           |            |

Adapun data sarana dan prasarana gedung di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus sebagai berikut:

Tabel 33  
Matriks Sarana dan Prasarana

| No. | Sarana / Prasarana Gedung | Jumlah | *Keterangan |
|-----|---------------------------|--------|-------------|
| 1.  | Ruang Ketua               | 1      |             |
| 2.  | Ruang Wakil Ketua         | 1      |             |
| 3.  | Ruang Hakim               | 3      |             |
| 4.  | Ruang Panitera            | 1      |             |
| 5.  | Ruang Sekretaris          | 1      |             |
| 6.  | Ruang Kepala Bagian Umum  | 1      |             |
| 7.  | Ruang Sidang              | 11     |             |
| 8.  | Ruang Panitera Muda       | 3      |             |
| 9.  | Ruang Kepala Sub Bagian   | 3      |             |
| 10. | Ruang Panitera Pengganti  | 1      |             |
| 11. | Ruang Juru sita           | 1      |             |
| 12. | Ruang Kesehatan           | 1      |             |
| 13. | Ruang Ramah Anak          | 1      |             |
| 14. | Ruang Arsip               | 4      |             |
| 15. | Ruang Satpam              | 2      |             |
| 16. | Ruang Perpustakaan        | 1      |             |
| 17. | Ruang Mediasi             | 4      |             |
| 18. | Ruang Istirahat / Karaoke | 1      |             |
| 19. | Ruang Tunggu Anak         | 1      |             |

|     |                              |    |  |
|-----|------------------------------|----|--|
| 20. | Ruang Server                 | 1  |  |
| 21. | Ruang Pos Bantuan Hukum      | 1  |  |
| 22. | Ruang Tunggu Jaksa           | 1  |  |
| 23. | Ruang Tunggu Penasehat Hukum | 1  |  |
| 24. | Ruang Mediator Non-Hakim     | 1  |  |
| 25. | Ruang Menyusui               | 1  |  |
| 26. | Ruang Tahanan                | 2  |  |
| 27. | Ruang Tamu Terbuka           | 2  |  |
| 28. | Musholla Umum                | 1  |  |
| 29. | Musholla Pegawai             | 2  |  |
| 30. | Ruang Rapat Pimpinan         | 0  |  |
| 31. | Media Center                 | 2  |  |
| 32. | Ruang Fitnes                 | 1  |  |
| 33. | Ruang Diversi                | 1  |  |
| 34. | Ruang Bapas/Peksos/Konseling | 1  |  |
| 35. | Ruang Merokok                | 1  |  |
| 36. | Kantin/Cafe                  | 1  |  |
| 37. | Kantor Kas BTN               | 1  |  |
| 38. | Ruang ATM                    | 1  |  |
| 39. | Ruang Gardu Listrik          | 1  |  |
| 40. | Ruang Air Sanyo              | 1  |  |
| 41. | Ruang Mesin Lift             | 1  |  |
| 42. | Ruang Genset                 | 1  |  |
| 43. | Gudang                       | 3  |  |
| 44. | Toilet                       | 32 |  |

Sarana dan prasarana fasilitas perkantoran merupakan sarana dan meubelair baik yang ada di kantor maupun di rumah dinas. Data sarana dan prasarana fasilitas perkantoran tersebut dapat dilihat secara rinci pada table berikut:

Tabel 34

Matriks Sarana dan Prasarana Fasilitas Perkantoran

| No. | Sarana / Prasarana Fasilitas Perkantoran | Jumlah | Keterangan |
|-----|--|--------|------------|
| 1.  | Elevator/Lift                            | 2      |            |
| 2.  | Stationary Generating Set                | 2      |            |
| 3.  | Pompa Air                                | 1      |            |
| 4.  | Mesin Bor Lainnya                        | 1      |            |
| 5.  | Mesin Pompa Air PMK                      | 1      |            |
| 6.  | Mesin Penghitung Uang                    | 1      |            |
| 7.  | Lemari Besi/Metal                        | 151    |            |
| 8.  | Lemari Kayu                              | 42     |            |
| 9.  | Rak Besi                                 | 93     |            |
| 10. | Rak Kayu                                 | 8      |            |
| 11. | Filing Cabinet Besi                      | 51     |            |
| 12. | Brandkas                                 | 2      |            |
| 13. | Tabung Pemadam Api                       | 21     |            |
| 14. | CCTV                                     | 47     |            |
| 15. | White Board                              | 5      |            |

|     |   |     |  |
|-----|---|-----|--|
| 16. | Alat Detektor Barang/X Ray                | 2   |  |
| 17. | LCD Projector/Infocus                     | 2   |  |
| 18. | Pintu Electric (yang Memakai Akses)       | 7   |  |
| 19. | Alat Sidik Jari                           | 1   |  |
| 20. | Walkthrough/ Portal Metal Detector        | 1   |  |
| 21. | Mesin Antrian                             | 2   |  |
| 22. | Papan Pengumuman                          | 1   |  |
| 23. | Box Penyimpanan Tabung Pemadam Api        | 1   |  |
| 24. | Alat Kantor Lainnya                       | 28  |  |
| 25. | Meja Kerja Besi/Metal                     | 25  |  |
| 26. | Meja Kerja Kayu                           | 301 |  |
| 27. | Kursi Besi/Metal                          | 786 |  |
| 28. | Kursi Kayu                                | 77  |  |
| 29. | Sice                                      | 10  |  |
| 30. | Bangku Panjang Besi/Metal                 | 63  |  |
| 31. | Meja Rapat                                | 15  |  |
| 32. | Meja Komputer                             | 2   |  |
| 33. | Tempat Tidur Besi                         | 1   |  |
| 34. | Tempat Tidur Kayu                         | 3   |  |
| 35. | Meja Resepsionis                          | 11  |  |
| 36. | Kasur/Spring Bed                          | 1   |  |
| 37. | Meja Makan Kayu                           | 7   |  |
| 38. | Partisi                                   | 19  |  |
| 39. | Backdrop TV/Wadrobe                       | 2   |  |
| 40. | Sofa                                      | 2   |  |
| 41. | Meubelair Lainnya                         | 17  |  |
| 42. | Mesin Pemetong rumput                     | 1   |  |
| 43. | Mesin Cuci                                | 2   |  |
| 44. | Alat pembersih Lainnya                    | 1   |  |
| 45. | AC Sentral                                | 71  |  |
| 46. | AC Split                                  | 66  |  |
| 47. | Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) | 9   |  |
| 48. | Kipas Angin                               | 10  |  |
| 49. | Exhasue Fan                               | 16  |  |
| 50. | Kompor Gas (Alat Dapur)                   | 2   |  |
| 51. | Mixer                                     | 4   |  |
| 52. | Televisi                                  | 34  |  |
| 53. | Amplifier                                 | 1   |  |
| 54. | Loudspeaker                               | 77  |  |
| 55. | Soundsystem                               | 10  |  |
| 56. | Compact Disc Player                       | 1   |  |
| 57. | Microphone                                | 136 |  |
| 58. | Microphone Table Stand                    | 6   |  |
| 59. | Camera Video                              | 1   |  |
| 60. | Tiang bendera                             | 18  |  |
| 61. | Tangga Alumunium                          | 1   |  |
| 62. | Dispenser                                 | 12  |  |
| 63. | Mimbar/Podium                             | 1   |  |
| 64. | Palu Sidang                               | 1   |  |
| 65. | Lambang Instansi                          | 29  |  |
| 66. | Karpet                                    | 15  |  |

|      |   |     |  |
|------|---|-----|--|
| 67.  | Gordyin/Kray  | 15  |  |
| 68.  | Asbak Tinggi  | 12  |  |
| 69.  | Kabel   | 34  |  |
| 70.  | Bracket Standing Peralatan                              | 40  |  |
| 71.  | Tangki Air  | 1   |  |
| 72.  | Alat Rumah Tangga Lainnya (Homeuse)                     | 43  |  |
| 73.  | Alat Rumah Tangga Lainnya                               | 95  |  |
| 74.  | Audio Mixing Console                                    | 3   |  |
| 75.  | Uninterruptible Power Supply (UPS)                      | 10  |  |
| 76.  | Battery Charge (Peralatan Audio Studio)                 | 56  |  |
| 77.  | Digital Audio Tape recorder                             | 1   |  |
| 78.  | Digital Led Running Text                                | 2   |  |
| 79.  | Mixer Sound System                                      | 11  |  |
| 80.  | Rak Peralatan   | 1   |  |
| 81.  | Lensa Kamera  | 2   |  |
| 82.  | Camera Digital  | 2   |  |
| 83.  | Lampu Blitz Camera                                      | 1   |  |
| 84.  | Video Conference  | 1   |  |
| 85.  | LCD Monitor   | 12  |  |
| 86.  | Camera Conference                                       | 20  |  |
| 87.  | Video Wall  | 1   |  |
| 88.  | Handy Talk (HT)   | 15  |  |
| 89.  | Facsimile   | 1   |  |
| 90.  | Finger Printer Time and Attandance Acces Control System | 7   |  |
| 91.  | Network Monitoring System                               | 1   |  |
| 92.  | Alat Komunikasi Lainnya                                 | 1   |  |
| 93.  | Mini Komputer   | 1   |  |
| 94.  | Komputer Jaringan Lainnya                               | 1   |  |
| 95.  | P.C Unit  | 238 |  |
| 96.  | Laptop  | 40  |  |
| 97.  | Tablet PC   | 6   |  |
| 98.  | Printer (Peralatan Personal Komputer)                   | 86  |  |
| 99.  | Scanner (Peralatan Personal Komputer)                   | 52  |  |
| 100. | External  | 1   |  |
| 101. | Keyboard (Peralatan Personal Komputer)                  | 6   |  |
| 102. | External (Portable/ Hardisk)                            | 11  |  |
| 103. | Peralatan Personal Komputer Lainnya                     | 1   |  |
| 104. | Server  | 5   |  |
| 105. | Router  | 3   |  |
| 106. | Hub   | 37  |  |
| 107. | Rak Server  | 5   |  |
| 108. | Switch  | 1   |  |
| 109. | Acces Point   | 55  |  |
| 110. | Peralatan Jaringan Lainnya                              | 40  |  |
| 111. | Peralatan Komputer Lainnya                              | 6   |  |
| 112. | Alat Deteksi Lainnya                                    | 168 |  |
| 113. | Fire Alarm System                                       | 7   |  |
| 114. | Monografi   | 37  |  |
| 115. | Buku Lainnya  | 18  |  |
| 116. | Lisensi   | 1   |  |
| 117. | Aset Tak Berwujud Lainnya                               | 5   |  |

|      |                              |   |  |
|------|------------------------------|---|--|
| 118. | VTR Recorder                 | 1 |  |
| 119. | Network Attach Storage (NAS) | 1 |  |
| 120. | Microphone/Wireless MIC      | 3 |  |
| 121. | Roll Opek                    | 3 |  |

### C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Kondisi perangkat keras dan perangkat lunak yang tersedia di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus:

Tabel 35  
Perangkat Keras

| NO  | PERANGKAT KERAS | JUMLAH | KONDISI                                   |
|-----|-----------------|--------|---|
| 1.  | PC Server       | 3      | Baik                                      |
| 2.  | PC Desktop      | 235    | 131 Baik, 64 Rusak Ringan, 40 Rusak Berat |
| 3.  | Laptop          | 40     | 23 Baik, 16 Rusak Berat                   |
| 4.  | Kamera Digital  | 2      | Baik                                      |
| 5.  | Printer         | 86     | 27 Baik, 49 Rusak Ringan, 10 Rusak Berat  |
| 6.  | Switch 24 Port  | 1      | Baik                                      |
| 7.  | HUB             | 37     | Baik                                      |
| 8.  | Finger Print    | 7      | 5 Baik, 2 Rusak Berat                     |
| 9.  | Proyektor       | 2      | Baik                                      |
| 10. | Mikrotik        | 1      | Baik                                      |
| 11. | UPS             | 10     | Baik                                      |
| 12. | Tablet Android  | 6      | 3 Baik, 3 Rusak Berat                     |
| 13. | Scanner         | 52     | 25 Baik, 27 Rusak Berat                   |

Tabel 36  
Perangkat Lunak

|    |   |
|----|---|
| 1. | Website Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus<br>( <a href="http://pn-tangerang.go.id">http://pn-tangerang.go.id</a> )  |
| 2. | SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus<br>( <a href="http://www.sipp.pn-tangerang.go.id">www.sipp.pn-tangerang.go.id</a> dan 192.168.80.80/SIPP Lokal)   |
| 3. | Direktori putusan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus di direktori putusan Mahkamah Agung RI<br>( <a href="http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-tangerang">http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-tangerang</a> ) |
| 4. | Aplikasi Jadwal Sidang (SIPP)   |
| 5. | Aplikasi SIKEP, KOMDANAS, SAKTI, SIMAN, E-SADEWA, E-IPLANS, DIPA, MONEV SATU DJA, MONEV BAPPENAS, SIMPONI, SIMARI, E-COURT, PTSP+, E-BERPADU, BATARA, SENAYAN   |
| 6. | Aplikasi LINTANG (Layanan Informasi Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus 08111507801)  |
| 7. | Aplikasi IKM (Index Kepuasan Masyarakat)  |
| 8. | Aplikasi Buku Tamu  |

|     |   |
|-----|---|
| 9.  | Aplikasi Persuratan (PTSP) dan Era Terang   |
| 10. | Aplikasi Si-Cuplis (Sistem Cuti Pegawai Online Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus) |
| 11. | Aplikasi e-Laksa (Layanan Elektronik Kependudukan Satu Atap)                                |
| 12. | Aplikasi Si-Kentang (Keuangan Perkara)  |

#### 1. Implementasi *E-Court* di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus

Lahirnya aplikasi *e-court* tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Aplikasi *e-court* merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*Justice reform*) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (*IT for Judiciary*) yang diterbitkan pada Maret 2018 tersebut sangat relevan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki issue utama dalam *access to justice*. Dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, hal ini menjadi tonggak awal dalam revolusi administrasi perkara di pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung ini juga merupakan pondasi dari implementasi aplikasi *e-court* di dunia peradilan Indonesia, sehingga peradilan berwenang untuk menerima pendaftaran perkara dan menerima pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik. Secara substansial, peraturan mahkamah agung tersebut tidak menghapus ataupun menganulir norma yang berlaku, melainkan menambah ataupun menyempurnakannya. Selain mengatur dalam beracara secara elektronik, eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 memberikan kewenangan kepada juru sita/juru sita pengganti di pengadilan untuk menyampaikan *relas* (panggilan/pemberitahuan) secara *online*.

Penerapan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik atau yang disebut dengan *e-court* telah memberikan dampak langsung bagi praktik advokat di Indonesia. Kemudahan yang diberikan dalam sistem teknologi menjadi sebuah kebutuhan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan dengan mobilitas tinggi para pihak dan para penasihat hukum (advokat).

Sebagaimana diketahui, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA *E-Court*) yang telah diundangkan per tanggal 4 April 2018 meliputi administrasi perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan usaha Negara. Selanjutnya, Ketua Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Nomor 1 tahun 2019 tentang Pengganti Peraturan Nomor 3

tahun 2018 yakni adanya penambahan *E-Litigasi*, yang telah diterapkan di pengadilan sejak Februari 2020.

Aplikasi ini sebagaimana disampaikan Ketua Mahkamah Agung, terdiri dari tiga fitur utama, yakni pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran panjar uang perkara (*e-payment*) dan penyampaian pemberitahuan dan pemanggilan persidangan secara elektronik (*e-summons*). Berdasarkan Perma diatas, maka ditunjukkan beberapa pengadilan sebagai *pilot project* pelaksanaan *E-Court*, salah satunya adalah Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus. Sampai dengan akhir tahun 2025, jumlah total perkara perdata di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus yang mendaftar melalui *E-Court* adalah sebanyak 3.383 perkara, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 37  
Akun *E-Court*

| No. | Uraian  | Jumlah s.d tahun 2025<br>(akun pengguna) |
|-----|---|--|
| 1.  | Jumlah akun pengguna <i>E-Court</i> yang sudah diverifikasi dan valid (terdaftar) | 6.953                                    |
| 2.  | Jumlah akun yang belum valid  | 61                                       |

Data perkara perdata dari Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus yang mendaftar melalui *e-court* dapat dilihat uraiannya sebagai berikut:

Tabel 38  
Perkara Perdata Melalui *E-Court*

| No.   | Perkara Perdata melalui E-Court pada tahun 2023 | Jumlah Perkara |
|-------|---|----------------|
| 1.    | Gugatan   | 1.544          |
| 2.    | Bantahan  | 25             |
| 3.    | Gugatan Sederhana                               | 124            |
| 4.    | Permohonan                                      | 1.690          |
| Total |   | 3.383          |

## 2. Implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus

Modernisasi Manajemen Perkara merupakan salah satu misi yang harus diwujudkan dalam rangka mencapai visi Mahkamah Agung sebagai badan peradilan yang agung pada tahun 2035. Modernisasi manajemen perkara dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan pengadilan dalam konteks pemenuhan pelayanan untuk masyarakat. Penerapan SIPP yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus akan menghasilkan perubahan mendasar dalam cara pengadilan bekerja untuk melaksanakan fungsinya.

SIPP merupakan sebuah aplikasi manajemen perkara yang menyediakan data dan informasi untuk masyarakat seperti status perkara, jadwal sidang dan informasi lainnya yang dapat diakses melalui situs web maupun pada meja informasi di pengadilan. Bagi aparaturnya pengadilan, SIPP juga bermanfaat terkait pemasukan dan pengolahan data serta pencetakan laporan dan untuk memonitor dan menginventarisasi perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri.

Selain peningkatan kinerja, penerapan SIPP pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus juga berdampak positif pada tingkat pelayanan terhadap masyarakat yang akan berujung pada meningkatnya kepercayaan kepada lembaga peradilan.

Terkait penerapan SIPP ini, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum telah mengeluarkan Surat Edaran No.559/DJU/Hk.00.7/VI/2012 tanggal 12 Juni 2011 tentang Pelaksanaan SIPP di Lingkungan Peradilan Umum. Kebijakan ini dikeluarkan sebagai arahan kepada pengadilan di lingkungan peradilan umum untuk menerapkan SIPP dalam proses manajemen perkara.

Pada saat ini SIPP sedang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan administrasi perkara sesuai dengan Pola Bindalmin Mahkamah Agung. SIPP diharapkan sudah dapat mendukung pelaksanaan administrasi untuk semua jenis perkara, termasuk jurnal keuangan, dokumen *template*, dan pelaporan perkara secara elektronik. Saat ini Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus sudah menggunakan SIPP versi terbaru, yaitu versi 6.0.1.

### 3. Implementasi E-Berpadu di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus

Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.

Dalam rangka mewujudkan peradilan modern berbasis IT, Pada tahun 2018 Mahkamah Agung telah meluncurkan Aplikasi *E-Court* yang kemudian pada tahun 2019 disempurnakan dengan *e-Litigation* dan upaya hukum banding secara elektronik. Dalam kelanjutan modernisasi administrasi peradilan, pada tahun 2022 Mahkamah Agung melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana, dengan menciptakan inovasi pelayanan perkara pidana secara elektronik yaitu Aplikasi e-Berpadu atau elektronik Berkas Pidana Terpadu. Elektronik Berkas Pidana Terpadu (*e-Berpadu*) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum. Penegak Hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi dan Direktorat

Jenderal Pemasyarakatan. Aplikasi *e-Berpadu* hadir untuk mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik, maka *aplikasi e-Berpadu* pada seluruh Pengadilan di Indonesia telah berlaku.

Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus telah menggunakan versi *e-Berpadu* yang terbaru yaitu V.4.0 Pada aplikasi *e-Berpadu* fitur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik
2. Pengajuan Penetapan Izin atau Persetujuan Penggeledahan
3. Pengajuan Penetapan Izin atau Penyitaan
4. Pengajuan Perpanjangan Penahanan
5. Penangguhan Penahanan
6. Permohonan Pembantaran Penahanan
7. Permohonan Penetapan Diversi
8. Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti
9. Permohonan Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan
10. Pendaftaran Praperadilan Elektronik
11. Permohonan Izin Keluar Tahanan
12. Permohonan Pengalihan Penahanan
13. Permohonan Penangguhan Penahanan

Adapun data *e-Berpadu* pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus, sejak diberlakukan, sebagai berikut:

Tabel 39  
Data Penggunaan *E-Berpadu*

| No | Jenis Layanan          | Jumlah Kegiatan |
|----|------------------------|-----------------|
| 1  | Pelimpahan Berkas      | 2.188           |
| 2  | Perpanjangan Penahanan | 2.510           |
| 3  | Penyitaan              | 3.698           |

|   |                                |       |
|---|--------------------------------|-------|
| 4 | Penggeledahan                  | 2.491 |
| 5 | Penetapan Diversi              | 6     |
| 6 | Izin Besuk Tahanan             | 1.454 |
| 7 | Perpanjangan Penahanan Banding | 713   |
| 8 | Perpanjangan Penahanan MA      | 0     |

4. Implementasi Aplikasi Internal di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus

Tabel 40

Jumlah Pengguna Aplikasi Internal Pengadilan Negeri Tangerang Kelas

| No. | Nama Aplikasi | Jumlah Pengguna |
|-----|---------------|-----------------|
| 1.  | Sicuplis      | 202             |
| 2.  | Sikentang     | 10              |
| 3.  | E-Laksa       | 139             |

## **BAB V**

### **PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK**

#### **A. Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan Pengadilan**

Sebagai bagian dari penyelenggara pelayanan publik, badan peradilan, termasuk lembaga peradilan umum, saat ini dituntut melayani secara maksimal pencari masyarakat pengguna pengadilan. Harus diakui, saat ini pelayanan publik yang dilakukan oleh lembaga peradilan umum belum memenuhi ekspektasi atau harapan masyarakat pencari keadilan secara maksimal.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan dibawahnya senantiasa berupaya membangun wibawanya melalui berbagai kebijakan pembaruan demi terwujudnya peradilan yang agung. Arah kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertuang secara tegas dan eksplisit di dalam Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035. Di dalam Cetak Biru ini, sudah tegas ditetapkan visi dan misi badan peradilan sebagai acuan dan landasan utama bagi lembaga peradilan dalam mewujudkan harapannya tadi.

Salah satu strategi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam upaya mewujudkan harapan dan cita-cita itu adalah mereformasi birokrasi di lingkungan badan peradilan umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah dan sedang mengakreditasi setiap Satker yang ada di seluruh Indonesia, yang salah satu cara dan mekanisme untuk mengetahui sejauh mana ekspektasi masyarakat pencari keadilan telah terpenuhi atau belum adalah dengan melakukan survei indeks kepuasan masyarakat pengguna pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, tanggal 13 April 2016 Nomor 520/DJU/PS.02/4/2016, dan diperbarui lagi dengan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, tanggal 5 Mei 2016, Nomor 608/DJU/PS.02/5/ 2016 yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Untuk itu, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus telah melakukan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat, dalam hal ini pengguna masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus yang didasarkan pada Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 13 April 2016 Nomor 520/DJU/PS.02/4/2016, dan tanggal 5 Mei 2016, Nomor 608/DJU/PS.02/5/ 2016 tersebut.

Survei kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus serta masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus. Adapun sasaran-sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus.

Hasil survei terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus sebesar 3,89 atau dengan skala 100 adalah sebesar 97,32% berada pada kategori "SANGAT BAIK" (pada interval 88,31 – 100,00). Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

1. Kesesuaian Persyaratan di Pengadilan Negeri Tangerang berada pada kategori SANGAT BAIK;
2. Prosedur pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang berada pada kategori SANGAT BAIK;
3. Waktu pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang pada kategori BAIK;
4. Biaya/Tarif pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang pada kategori SANGAT BAIK;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang pada kategori SANGAT BAIK;
6. Kompetensi Pelaksana di Pengadilan Negeri Tangerang pada kategori SANGAT BAIK;
7. Perilaku Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang pada kategori SANGAT BAIK;
8. Sarana dan Prasarana di Pengadilan Negeri Tangerang pada kategori SANGAT BAIK;
9. Penanganan Pengaduan dan Saran di Pengadilan Negeri Tangerang pada kategori SANGAT BAIK.



## **B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan, bahwa perubahan sistem pelayanan tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri melalui satu pintu.

Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan tersebut diperlukan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sesuai dengan tugas fungsi pengadilan. Melalui PTSP ini Mahkamah Agung ingin memberikan pelayanan prima dalam hal pelayanan publik yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap awal sampai akhir/terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat.

Wujud keseriusan Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan di bawahnya terhadap penerapan PTSP tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Penerapan PTSP sendiri tidak lain memiliki tujuan untuk:

1. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
2. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.

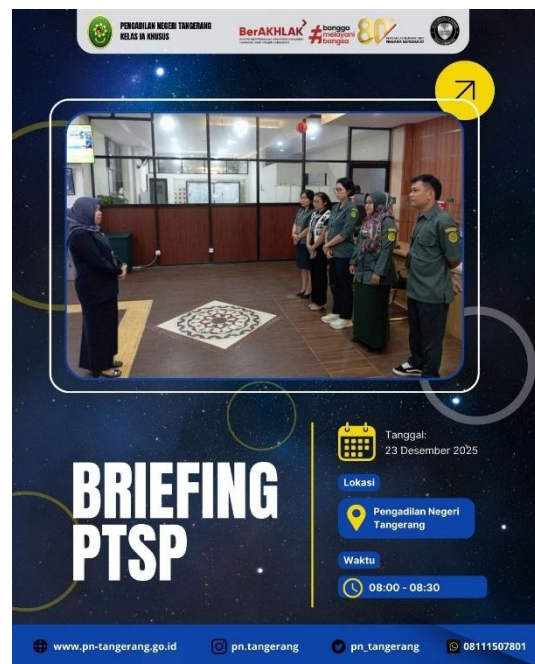
Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Secara umum Prosedur PTSP dilaksanakan melalui tahapan berikut:

1. Pemohon mengambil nomor antrian yang telah disediakan;
2. Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan untuk setiap layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk pemrosesan serta penyelesaian permohonan layanan;
3. Petugas PTSP mencatat, memverifikasi dan meneruskan kelengkapan berkas/dokumen ke backoffice untuk diproses sesuai SOP yang telah ditentukan. Khusus untuk pengadilan-pengadilan dengan jumlah perkara banyak agar menyediakan petugas verifikasi kelengkapan syarat-syarat sebelum diajukan ke meja PTSP.

Pelaksanaan program PTSP ini sangatlah diperlukan komitmen oleh seluruh Pimpinan dan Aparatur Pengadilan secara terintegrasi dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu dalam rangka mewujudkan keberhasilan pelaksanaan PTSP tersebut, maka haruslah terdapat kualifikasi tertentu dalam hal standarisasi pelayanan yang harus dimiliki oleh seluruh petugas PTSP, yang antara lain sebagai berikut:

1. Memahami Standar Layanan Pengadilan, prosedur administrasi maupun prosedur beracara di Pengadilan untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri;
2. Memahami profil pengadilan seperti struktur organisasi dan persidangan, peraturan, keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
3. Memiliki kemampuan mengoperasikan computer; dan
4. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, bersikap sopan dan ramah, serta berpenampilan rapi.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus rutin melakukan *briefing* atau pengarahan kepada seluruh petugas PTSP setiap hari Senin sampai dengan Kamis, pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 08.20 WIB. Hal ini diperkuat dengan Surat Keputusan dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Nomor:7593/KPN. W29.U4/SK.HK1.2.5/XI/2025 tentang Struktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 11 November 2025.



PTSP Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus juga memiliki sarana dan prasarana untuk kaum rentan dan disabilitas yang sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA-RI No.1692/DJU/SK/PS.00/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Sarana dan Prasarana tersebut antara lain:

- Alat Bantu Dengar;
- Tempat parkir disabilitas;

- Tempat antrian prioritas;
- Ruang sidang difabel;
- Ruang tunggu disabilitas;
- Toilet disabilitas yang dilengkapi dengan alarm;
- Tongkat lipat disabilitas;
- Ruang laktasi;
- Ruang kesehatan;
- Ramp;
- Meja disabilitas;
- Layanan disabilitas/tempat duduk prioritas;
- Kursi roda;
- Kruk; dan
- *Guiding Block.*



Untuk mendukung pelayanan kepada disabilitas, 2 (dua) orang pegawai di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Pelayanan Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Banten pada tanggal 19 Juni 2025, sesuai Surat Tugas dari Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Nomor:342/SEK.W29-U4/ST.KP7.1/VI/2025 atas nama Nurwita, S.H. dan

Ziyadatul Ihsan, A.Md.

Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus juga telah menyelenggarakan Pelatihan *Excellent Service* dan Pelatihan Disabilitas yang diikuti oleh seluruh petugas PTSP, pada tanggal 25 Juli 2025 di Aula Pengadilan Negeri Tangerang, berdasarkan Surat Undangan Nomor:3939/KPN.W29.U4/UND.DL.1.10/VII/2025. Pelaksanaan pelatihan ini dilakukan dengan mengundang 2 (dua) narasumber, antara lain:

1. Narasumber yang berasal dari BRI Cabang

Tangerang, terkait Pelatihan *Excellent Service*, yang membagikan materi terkait



pelayanan prima, etika melayani, komunikasi efektif dengan pengguna layanan, serta sikap profesional dalam menghadapi berbagai tipe masyarakat.

2. Narasumber yang berasal dari Yayasan Karya Dharma Wanita (YKDW) 02 Kota Tangerang, terkait pelatihan khusus mengenai layanan ramah disabilitas, mencakup pemahaman dasar tentang ragam disabilitas, pendekatan inklusif, dan penggunaan fasilitas pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas.

Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk membekali petugas PTSP dengan keterampilan praktis dalam memberikan layanan yang cepat, tepat, ramah, dan inklusif, sejalan dengan prinsip pelayanan publik modern yang berkeadilan. Pentingnya peran PTSP sebagai garda terdepan institusi peradilan yang harus mencerminkan citra positif lembaga kepada masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM dalam hal pelayanan menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Diharapkan melalui pelatihan ini, seluruh petugas PTSP dapat memberikan layanan yang lebih humanis, responsif, dan ramah terhadap kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas.

Selain mengadakan dan mengikuti pelatihan terkait pelayanan kepada penyandang disabilitas, maka dalam rangka meningkatkan layanan inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus juga mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi terkait dengan sarana dan prasarana disabilitas. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 16 Juli 2025 dan dilakukan bersama dengan Sekolah Khusus Yayasan Karya Dharma Wanita



(SKY KDW) 03 Kota Tangerang. Dalam kegiatan ini juga dibahas mengenai sejumlah catatan dan kebutuhan perbaikan fasilitas umum, termasuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas serta optimalisasi fungsi pelayanan publik lainnya. Dengan adanya monitoring dan evaluasi ini diharapkan setiap unit kerja dapat mengambil langkah-langkah strategis guna meningkatkan kualitas pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus.

### C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Mahkamah Agung meluncurkan Cetak Biru pada tahun 2003, di mana terdapat beberapa aspek pembaharuan, antara lain:

- Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung.

- Cetak Biru Pembaruan Pendidikan & Latihan Peradilan
- Cetak Biru Pembaruan SDM Peradilan
- Cetak Biru Pembaruan Manajemen Keuangan Peradilan

Pada tahun 2007 Mahkamah Agung ditunjuk sebagai salah satu Lembaga Negara yang melaksanakan Pilot Project Reformasi Birokrasi (RB). Berdasarkan Perpres Nomor 19 Tahun 2008 maka Mahkamah Agung menerima 70% Tunjangan Kinerja, pada tataran implementasinya Perpres tersebut dikelola dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 210/KMA/SK/VIII/2020 tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus sampai pada saat ini masih terus mengembangkan dan mengevaluasi setiap aplikasi yang sudah ada agar lebih berjalan optimal dan bermanfaat bagi para pencari keadilan. Aplikasi yang sudah ada saat ini adalah E-laksa, Si-Cuplis, dan Si-Kentang.

E-laksa adalah layanan yang memungkinkan pihak bisa mengajukan permohonan pelaporan pencatatan sipil dalam rangka penerbitan dokumen kependudukan melalui inovasi Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus. Dengan inovasi ini layanan paripurna bisa diberikan di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus. Aplikasi ini memfasilitasi jenis pelaporan pencatatan sipil: Pembatalan Perkawinan, Perceraian, Pembatalan Perceraian, Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, Perubahan Nama.

SICUPLIS atau Sistem Cuti Pegawai Lewat Aplikasi, merupakan aplikasi administrasi cuti pegawai berbasis online untuk internal Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus. Sistem ini berfungsi untuk manajemen cuti dan izin secara online. Proses permohonan, verifikasi dan keputusan dapat diakses melalui <https://sicuplis.pn-tangerang.go.id> dari manapun. Penandatanganan pada sistem ini dilakukan dengan scan *QRcode* pada dokumen. Apabila cuti tahunan disetujui oleh pejabat berwenang maka sisa cuti tahunan akan berkurang otomatis.

Sedangkan SIKENTANG Sistem Informasi Keuangan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus, merupakan aplikasi administrasi keuangan berbasis online untuk internal Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus. Aplikasi ini menyinkronkan data dengan data keuangan perkara yang ada di SIPP. Aplikasi ini membantu bendahara keuangan perkara dalam pencatatan dan pelaporan.

Pada tahun 2025, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1693/DJU/SK.OT1.6/XII/2025 tentang Penetapan Penilaian Kinerja dan Layanan Pada Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2025, Pengadilan Negeri

Tangerang Kelas IA Khusus mendapatkan 2 (dua) penghargaan terkait dengan Penilaian Layanan Hukum Tahun 2025, yaitu:

1. Juara Terbaik ke-I dalam Kategori Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)
2. Juara Terbaik ke-IV dalam Kategori Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Acara penyerahan penghargaan ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 17 Desember 2025, dengan tema "Penyerahan Penghargaan Kinerja dan Layanan Terbaik di Lingkungan Peradilan Umum, Abhinaya Upangga Wisesa Tahun 2025". Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi atas dedikasi dan inovasi satuan kerja dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja demi mewujudkan badan peradilan yang agung dan modern. Dengan diraihnya penghargaan ini, diharapkan dapat memacu kinerja aparatur pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus yang lebih baik dalam pelayanan terhadap pencari keadilan



## **BAB VI**

### **PENGAWASAN**

#### **A. INTERNAL**

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pengawasan internal bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Pengawasan internal dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti:

- Audit;
- Evaluasi;
- Pemantauan;
- Menyusun peta risiko pengendalian internal;
- Menyusun program dan kegiatan pengawasan;
- Melaksanakan pengawasan kepatuhan, kinerja, dan mutu;
- Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan internal atau Pengawasan Bidang; dan
- Memantau dan mengkoordinasikan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal

Sebagai bentuk pengimplementasian dari pengawasan internal, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus membuat Surat Keputusan dalam rangka meningkatkan disiplin kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Nomor 7556/KPN.W29.U4/SK.HK.1.2.5/XI/2025 tentang Pembentukan Tim Pemantau Disiplin pada Pengadilan Negeri Tangerang, di mana dalam Surat Keputusan dimaksud, Tim Pemantau Disiplin Pengadilan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memantau kedisiplinan Hakim dan Pegawai melalui absensi;
- b. Membuat laporan hasil pemantauan disiplin Hakim dan Pegawai;
- c. Melaporkan hasil pemantauan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang setiap bulannya.

Selain membuat Surat Keputusan tentang Tim Pemantau Disiplin, pimpinan di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus juga melakukan pengawasan dan pembinaan dari atasan langsung kepada jajaran dibawahnya dengan secara berkala melakukan Rapat Bulanan dan Rapat Pengawasan Bidang. Adapun pengawasan bidang tertuang dalam dalam Surat Keputusan Nomor 7978/KPN.W29.U4/SK.HK.1.2.5/XI/2025 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Tangerang.

## B. EKSTERNAL

Pengawasan eksternal sangat diperlukan untuk memantau sistem peradilan Indonesia. Ketidakpercayaan publik atas institusi yang terlibat di dalam proses peradilan menjadi salah satu pemicu munculnya lembaga pengawasan peradilan yang bersifat independen dan belum terkontaminasi oleh sistem yang ada. Pengawasan eksternal pada peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lembaga pengawas eksternal yang kredibel. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan. Tujuan pengawasan eksternal ini agar proses peradilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar. Bentuk pengawasan eksternal dari Mahkamah Agung berupa pengawasan dari Pengadilan Tinggi dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI).

Pengadilan Tinggi Banten telah melakukan pengawasan terhadap Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus sebanyak 2 (dua) kali dalam tahun 2025, yaitu pada tanggal 24-25 April 2025 dan juga pada tanggal 18-19 September 2025.



Adapun Badan Pengawasan MARI bersama dengan Biro Keuangan MARI telah melakukan pendampingan tata kelola laporan keuangan dalam rangka pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengawasan eksternal juga dapat dilakukan oleh lembaga eksternal yang memiliki kompetensi seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Yudisial. BPK adalah lembaga negara yang bertugas sebagai auditor eksternal untuk mengawasi pengelolaan keuangan negara. BPK berperan sebagai pengawas eksternal karena berada di luar susunan organisasi pemerintah. Sedangkan Komisi Yudisial melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim. Pengawasan Komisi Yudisial dilakukan terhadap perilaku hakim di dalam dan di luar persiangan, mencakup sikap, tindakan, dan ucapan hakim.

## **BAB VII**

### **KESIMPULAN DAN PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus telah disusun berdasarkan hasil analisis kenyataan secara objektif dengan informasi yang sebenarnya pada pelaksanaan kegiatan di Tahun 2025. Transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu prinsip untuk mendukung pemerintahan yang baik.

Untuk itu, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus sesuai harapan Pengadilan Tinggi Banten dan Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan Penyusunan Laporan Kegiatan tahun 2025 dengan harapan institusi lain dan masyarakat dapat lebih mengetahui berbagai persoalan kinerja dan kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus yang sangat kompleks di lapangan.

Dengan disusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bahan koreksi dan pedoman bagi pelaksanaan upaya pencapaian Visi dan Misi Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus, yaitu:

- Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Tangerang Yang Agung
- Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tangerang;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tangerang;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Tangerang.

Dalam memberikan pelayanan yang maksimal, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus juga menyelenggarakan proses peradilan “sederhana, mudah, cepat, dan biaya ringan” sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman maka laporan ini dimaksudkan untuk menampung dan menjawab tantangan tersebut guna mewujudkan rasa keadilan masyarakat, mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, memperbaiki akses pelayanan publik, memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan, mewujudkan institusi peradilan yang efektif dan efisien, bermartabat serta dihormati dan melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus dalam hal memberikan pelayanan publik melalui Sistem Teknologi Informasi, SIPP, dan pelayanan dalam bentuk manual dan berbasis Teknologi Informasi merupakan keberhasilan bersama seluruh jajaran Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus, sekalipun tidak luput dari kendala-kendala yang dihadapi baik internal maupun eksternal.

Semakin sedikitnya perkara-perkara banding dan kasasi atas produk putusan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus, menandai tingkat kepuasan/kepercayaan masyarakat pencari keadilan semakin tinggi. Hal tersebut berarti perubahan kinerja seluruh jajaran Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus di tahun 2025 semakin baik jika dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Tanggung jawab Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus dalam hal penggunaan anggaran untuk biaya-biaya/belanja pegawai dan barang semakin efektif dan efisien, tepat cara dan sasaran. Hal tersebut dapat dilihat dalam posisi keuangan DIPA tahun 2024, keseimbangan RKA-KL, pelaksanaan dan sisa anggaran yang dianalisis secara *reasonable* dan *accountable*.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini masih jauh dari sempurna dan bersifat terbuka untuk diadakan koreksi dan penyesuaian serta perbaikan di masa mendatang.

## **B. PENUTUP**

Demikian yang dapat kami sajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus kepada masyarakat kami sampaikan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 kepada Pengadilan Tinggi Banten selaku instansi Pembina kami, besar harapan kami dapat mewujudkan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Saran dan masukan untuk perbaikan kinerja Pengadilan Negeri Tangerang kelas 1A Khusus tetap kami harapkan sebagai perbaikan dan evaluasi kinerja pada tahun berikutnya.

Hormat Kami,  
Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus



Muhammad Alfi Sahrin Usup